

PROFIL
DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025



DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 130 TEMANGGUNG

**PROFIL
DPPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen profil ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta sebagai media informasi bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait tugas, fungsi, program, serta capaian kinerja Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung. Profil ini memuat gambaran umum kelembagaan, sumber daya, program dan kegiatan, serta berbagai inovasi dan capaian yang telah dilaksanakan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Tahun 2025 merupakan momentum penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung yang inklusif, responsif gender, ramah anak, serta memiliki kualitas keluarga yang tangguh dan sejahtera. Melalui dokumen ini, kami berharap dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan kontribusi Dinas PPPAPPKB dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga dokumen profil ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak.

Temanggung, Januari 2026
Kepala Dinas PPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM
NIP. 197007301990012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
COVER DALAM.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAN ORGANISSI.....	5
A. Kedudukan dan Dasar Pembentukan.....	5
B. Tugas dan Fungsi.....	6
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Visi Misi.....	8
1. Visi.....	8
2. Misi.....	9
E. Sumberdaya Organisasi.....	11
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	11
2. Sarana dan Prasarana.....	13
3. Anggaran.....	14
4. Jejaring dan Kemitraan.....	17
5. Komitmen Pelayanan.....	18
F. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).....	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025.....	
A. Tujuan.....	20
B. Sasaran.....	20
C. Program.....	21
BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN INDIKATOR TAHUN 2025.....	25
A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	25
1. Aspek Kesejahteraan.....	25
2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD).....	31
3. Indikator Program.....	33

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	53
1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	53
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	56
3. Indikator Program.....	61
BAB V INOVASI DAN PENGHARGAAN.....	89
BAB VI PENUTUP.....	94
LAMPIRAN.....	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Manusia Yang Tersedia Tahun 2025.....	12
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Pendukung Tupoksi Tahun 2025	14
Tabel 3	Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025.....	15
Tabel 4	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025.....	29
Tabel 6	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Tempat Pelayanan KB.....	78
Tabel 7	Inovasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.....	89
Tabel 8	Daftar Penghargaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DPPPAPPKB.....	7
Gambar 2	Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2025.....	26
Gambar 3	Indek Pemberdayaan Gender (IDG).....	28
Gambar 4	Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada Belanja Langsung APBD Tahun 2023-2025.....	35
Gambar 5	Capaian Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2025.....	37
Gambar 6	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2025.....	55
Gambar 7	Indek Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2025.....	58
Gambar 8	Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi {Unmetneed) Tahun 2021-2025.....	65
Gambar 9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun Atau <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR)</i> 15–19 Tahun Pada Tahun 2021-2025.....	68
Gambar 10	Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi {Unmetneed) Tahun 2021-2025.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penguatan institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menjadi tantangan strategis di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Temanggung. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan, serta masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menuntut adanya kebijakan yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, dinamika kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata, serta kualitas keluarga yang beragam memerlukan intervensi kebijakan melalui pengendalian penduduk dan program keluarga berencana yang efektif.

Penguatan ketahanan keluarga juga menjadi isu penting dalam pembangunan sosial. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pembangunan keluarga yang berkualitas harus didukung melalui program yang mendorong perencanaan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, serta penguatan fungsi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kerangka otonomi daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. DPPPAPPKB berperan sebagai perumus kebijakan teknis, pelaksana program, koordinator lintas sektor, sekaligus fasilitator dalam mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan strategis.

Tahun 2025 menjadi bagian dari tahapan penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Tantangan global dan nasional, termasuk perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur sosial, serta dinamika ekonomi, turut memengaruhi pola kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, penyusunan Dokumen Profil DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menjadi sangat penting. Dokumen ini tidak hanya menyajikan gambaran umum organisasi, tetapi juga memuat informasi mengenai struktur kelembagaan, sumber daya manusia, program dan kegiatan, capaian kinerja, serta inovasi yang telah dilakukan. Dengan adanya dokumen profil ini, diharapkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran dan kontribusi DPPPAPPKB dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, dokumen profil ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi internal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah. Informasi yang tersaji di dalamnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung dapat berjalan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Dokumen Profil DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai media informasi dan dokumentasi resmi mengenai eksistensi serta kinerja perangkat daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.
- b. Menyajikan data dan informasi terkait sumber daya organisasi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Menyampaikan capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2025.
- d. Menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah, mitra kerja, akademisi, dan masyarakat dalam memahami peran DPPPAPPKB.

C. Ruang Lingkup

Dokumen Profil DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 memuat:

1. Gambaran umum dan organisasi;
2. Struktur organisasi dan sumber daya aparatur;
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2025;
4. Capaian kinerja dan indikator;
5. Inovasi dan penghargaan;

D. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen profil ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung;

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Kedudukan dan Dasar Pembentukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPPPAPPKB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara lebih teknis, pembentukan dan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi DPPPAPPKB ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 tahun 2022. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas, pembagian kewenangan, serta mekanisme kerja organisasi.

Selain itu, pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta regulasi terkait lainnya.

Dengan dasar hukum tersebut, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung memiliki legitimasi dan kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program dan kegiatan, melakukan pembinaan dan koordinasi lintas sektor, serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya. Kedudukan ini menegaskan peran strategis DPPPAPPKB dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang, serta terbangunnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera di Kabupaten Temanggung.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Praturan Bupati Temanggung Nomor 20 tahun 2022 tugas DPPPAPPKB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Dinas PPPAPPKB melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Susunan organisasi dirancang untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program di seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan dinas.

Secara struktural, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan program dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Sekretariat menjadi unsur pendukung yang memastikan kelancaran tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja.

Untuk melaksanakan urusan teknis, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung terdiri atas beberapa bidang, yaitu:

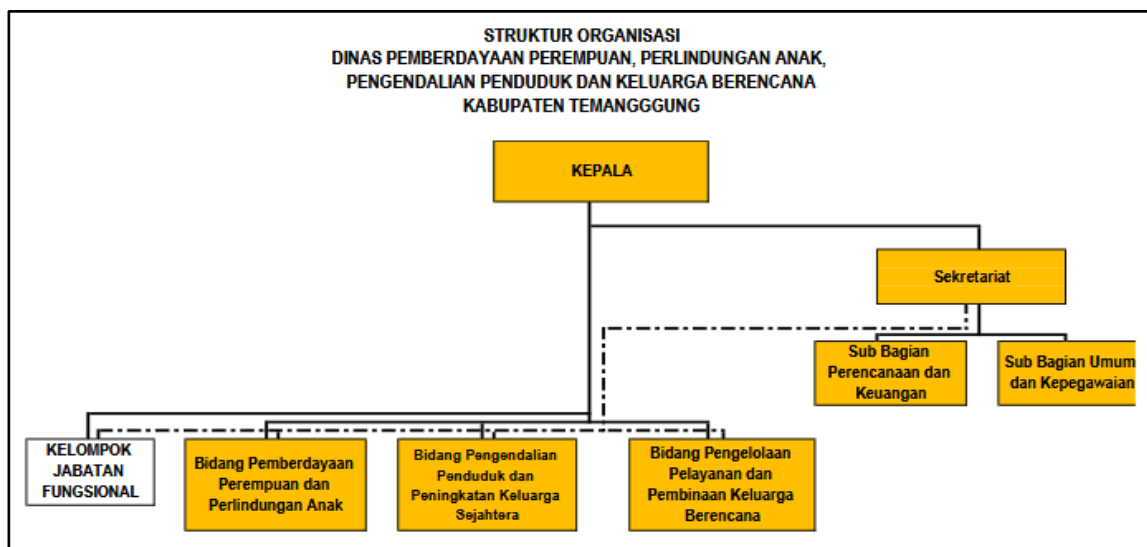
- 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 2. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**, yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

3. Bidang Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan KB, yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB.

Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan, terdapat Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di wilayah kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional juga menjadi bagian penting dalam struktur organisasi, yang menjalankan tugas sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing.

Struktur organisasi ini mencerminkan komitmen DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pelayanan publik yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Dengan struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terarah, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten.

Gambar 1
Struktur Organisasi DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



D. Visi Misi

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

**“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN,
MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
- b. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil;
- c. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
- e. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Penjelasan Makna Misi:

- a. Misi Pertama**, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.
- b. Misi Kedua**, Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung

sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

- c. Misi Ketiga,** Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
- d. Misi Keempat,** Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

- e. **Misi Kelima**, Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang

E. Sumberdaya Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung (DPPPAPPKB) merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana di wilayah Kabupaten Temanggung.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi beragam, antara lain di bidang administrasi publik, hukum, psikologi, kesehatan masyarakat, pemerintahan, komunikasi, serta sosial kemasyarakatan. Komposisi SDM mencakup:

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Yang Tersedia Tahun 2025

No	Jabatan	Kebutuhan	Keadaan	Kekurangan
A	ASN Daerah			
1	Struktural	7	4	3
2	Fungsional Ahli Muda, Madya	35	5	30
3	Fungsional Terampil, Mahir, Penyelia	6	2	4
4	Pelaksana	28	16	12
B	Non ASN (Pegawai Kontrak)			
1	Administrasi	2	2	0
2	Pengemudi	1	1	0
3	Satpam Dinas	6	6	0
4	Penjaga Malam Balai Penyuluhan KB	20	19	1
5	Pramusaji Balai Penyuluhan KB	20	20	0
C	ASN Pusat			
	Penyuluh KB	80	35	45
	Total	205	110	95

Ketersediaan sumber daya manusia pada saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada jabatan struktural, kebutuhan sebanyak 7 orang, sementara ketersediaan yang ada baru mencapai 4 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 3 orang (ada 3 jabatan yang kosong).

Pada jabatan fungsional keahlian yang meliputi jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, kebutuhan sebanyak 35 orang, sedangkan jumlah yang tersedia saat ini hanya 5 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 30 orang. Selanjutnya pada jabatan fungsional keterampilan dengan jenjang mahir dan penyelia, kebutuhan sebanyak 6 orang dengan ketersediaan 2 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 orang.

Untuk jabatan pelaksana, kebutuhan pegawai sebanyak 28 orang, sementara jumlah yang tersedia sebanyak 16 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 12 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan aparatur sipil negara masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPAPKB secara optimal.

Selain didukung oleh ASN, penyelenggaraan tugas dan pelayanan juga dibantu oleh tenaga Non-PNS yang terdiri dari

tenaga administrasi sebanyak 2 orang, pengemudi 1 orang, satpam di dinas sebanyak 6 orang, penjaga malam pada Balai Penyuluhan KB di kecamatan sebanyak 20 orang, serta pramusaji pada Balai Penyuluhan KB di kecamatan sebanyak 20 orang.

Di samping itu, terdapat dukungan tenaga ASN dari pemerintah pusat melalui BKKBN yang bertugas sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 35 orang. Namun demikian, berdasarkan analisis kebutuhan wilayah kerja, jumlah penyuluh KB yang ideal adalah sebanyak 80 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 45 orang. Kekurangan tenaga penyuluh tersebut berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program Bangga Kencana di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara bertahap.

Secara kuantitas dan kualitas, SDM DPPPAPKB terus ditingkatkan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial
- b. Bimbingan teknis dan workshop tematik
- c. Penguatan kapasitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Peningkatan kompetensi penyuluh dalam program Bangga Kencana

Pengembangan kapasitas SDM menjadi prioritas untuk menjamin pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, DPPPAPKB Kabupaten Temanggung didukung dengan:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Pendukung Tupoksi Tahun 2025

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Gedung	
	- Gedung Dinas	2
	- Gudang Arsip	1
	- Gudang Obat dan Alkon	1
	- Balai Penyuluhan KB	20
2	Kendaraan Roda 4 terdiri dari:	
	- Kendaraan jabatan	2
	- Kendaraan Antar Jemput Akseptor	2
	- Kendaraan Penerangan KB	1
	- Kendaraan Perlindungan	1
	- Kendaraan Operasional	1
	- Kendaraan Distribusi Alkon	1
3	Kendaraan Roda 2 terdiri dari:	
	- Kendaraan untuk Penyuh KB	35
	- Kendaraan untuk operasional kantor	34

Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan administrasi, pendampingan kasus, kegiatan penyuluhan, antar jemput akseptor serta koordinasi lintas sektor.

3. Anggaran

Ketersediaan anggaran pada DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.16.654.647.242,00 (*enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*). Anggaran tersebut bersumber dari beberapa komponen pendanaan yang terdiri atas belanja gaji, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Secara rinci, alokasi anggaran tersebut meliputi belanja gaji sebesar Rp.3.329.462.226,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.188.196.016,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp.11.439.157.000,00, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.697.832.000,00.

Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta alokasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	16.654.647.242	14.251.357.364	85,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.485.522	3.927.998.177	92,85
Administrasi Keuangan	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.275.000	36.657.797	93,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	1.361.000	97,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.815.000	6.779.000	99,47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.000	4.159.400	99,03
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.860.000	10.534.100	88,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	13.824.297	92,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.767.696	747.236.146	94,85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.862.000	4.693.000	96,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	29.281.833	90,10
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.860.000	97,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744.405.696	707.401.313	95,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.980.600	69.626.250	94,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.800.000	12.954.000	93,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.180.600	34.193.250	97,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	18.490.000	92,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	3.989.000	79,78
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.100.800	23.180.350	92,35
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	7.738.000	6.816.700	88,09
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	7.738.000	6.816.700	88,09
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.362.800	16.363.650	94,25
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.362.800	16.363.650	94,25
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.394.370	20.235.350	52,70
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.394.370	20.235.350	52,70
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.394.370	20.235.350	52,70
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	18.959.200	17.833.250	94,06
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.959.200	17.833.250	94,06
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.959.200	17.833.250	94,06

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	%
1	2	3	4
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.335.500	39.139.500	97,03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.335.500	39.139.500	97,03
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.335.500	39.139.500	97,03
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	88.369.400	73.931.100	83,66
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.294.600	64.440.050	97,20
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66.294.600	64.440.050	97,20
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.074.800	9.491.050	42,99
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.074.800	9.491.050	42,99
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	493.800.000	447.330.373	90,59
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	493.800.000	447.330.373	90,59
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.346.450	98,91
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	197.245.750	90,56
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	190.738.173	88,30
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.470.149.000	5.716.323.034	76,52
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.919.320.000	1.418.182.377	73,89
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.139.160.000	953.427.477	83,70
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	400.000.000	220.359.900	55,09
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	85.724.250	68,58
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.160.000	4.837.250	93,75
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	153.833.500	61,53
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.874.672.000	2.454.682.250	85,39
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.176.840.000	1.776.720.550	81,62
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	697.832.000	677.961.700	97,15
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.126.757.000	1.477.091.557	69,45
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	31.347.050	94,14
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	1.424.564.757	69,04
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.150.000	21.179.750	70,25
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	549.400.000	366.366.850	66,68

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	%
1	2	3	4
Fasilitas pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	275.000.000	252.783.500	91,92
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	274.400.000	113.583.350	41,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.249.053.450	3.985.386.230	93,79
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	198.298.000	170.100.845	85,78
Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	13.500.000	10.635.250	78,78
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	10.855.900	37,69
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	25.998.000	23.533.300	90,52
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000	125.076.395	96,21
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.050.755.450	3.815.285.385	94,19
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31.355.450	26.935.750	85,90
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.627.729.635	89,09
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.160.620.000	98,55
TOTAL	16.654.647.242	14.251.357.364	85,57

4. Jejaring dan Kemitraan

DPPPAPKB Kabupaten Temanggung menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

- a. Perangkat daerah terkait
- b. Instansi vertikal
- c. Lembaga pendidikan
- d. Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
- e. Organisasi perempuan
- f. Forum anak
- g. Forum Generasi Berencana
- h. Saka Kencana

Sinergi lintas sektor ini bertujuan memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara terpadu dan berkelanjutan.

5. Komitmen Pelayanan

Dengan dukungan sumber daya organisasi yang dimiliki, DPPAPPKB Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk:

- a. Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk secara seimbang.
- d. Meningkatkan kualitas keluarga melalui program keluarga berencana.
- e. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Seluruh sumber daya organisasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Temanggung **UNTUK SEMUA** (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman).

F. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)

Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan IMP menjadi ujung tombak dalam menjangkau keluarga secara langsung, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga yang berkualitas.

Di wilayah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan, terdapat sebanyak 1.926 orang kader IMP yang aktif berperan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) sebanyak 289 orang.
2. Kader Sub PPKBD sebanyak 1.637 orang

Kader PPKBD memiliki peran sebagai koordinator kegiatan di tingkat desa/kelurahan, yang bertugas menggerakkan dan membina kader Sub PPKBD, melakukan pendataan keluarga, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan petugas lapangan keluarga berencana. Sementara itu, kader Sub PPKBD berperan langsung di tingkat dusun/RW dalam melakukan penyuluhan, pendampingan

keluarga, serta pemantauan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

Melalui peran aktif IMP, berbagai kegiatan Program Bangga Kencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran, antara lain:

1. Pendataan dan pemutakhiran data keluarga
2. Penyuluhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
3. Edukasi pendewasaan usia perkawinan
4. Pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia
5. Fasilitasi rujukan pelayanan KB dan kesehatan

Keberadaan 1.926 kader IMP yang tersebar di seluruh kecamatan menunjukkan tingginya komitmen dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung. Dengan semangat gotong royong dan pengabdian, para kader IMP menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Penguatan kapasitas kader melalui pembinaan, pelatihan, dan koordinasi berkelanjutan terus dilakukan guna meningkatkan profesionalitas, akurasi data, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan IMP yang solid dan merata di 20 kecamatan, pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Temanggung diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

A. Tujuan

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 pada Misi 3 (tiga) **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. maka tujuan yang hendak dicapai oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah **“Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga”**. Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan ini diukur melalui 2 indikator yaitu Indek Ketimpangan Gender dan Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga).

B. Sasaran

Sasaran Pembangunan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025–2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025. Sasaran tersebut menjadi arah capaian kinerja perangkat daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana selama periode lima tahun.

Sasaran pembangunan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan perempuan, perlindungan terhadap anak, serta pengendalian

pertumbuhan penduduk melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sasaran ini juga mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil gender, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai antara lain meliputi:

1. **Meningkatnya kesetaraan Gender** diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender.
2. **Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak** diukur melalui indikator Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak
3. **Mewujudkan keluarga berkualitas** diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Penduduk.
4. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah** diukur melalui indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dan IKM Perangkat Daerah.

C. Program

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Dalam
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kebijakan Kebijakan Responsif Gender	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pertumbuhan Penduduk yang Terkendali	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitas pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

BAB IV

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Aspek Kesejahteraan

Aspek kesejahteraan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemenuhan hak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta penguatan peran dan kapasitas dalam pembangunan. Upaya ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan perlindungan yang responsif gender dan ramah anak.

Melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, aspek kesejahteraan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan mendukung tumbuh kembang anak serta kemandirian perempuan, sehingga terwujud masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Ukuran keberhasilan dari Aspek Kesejahteraan di Kabupaten Temanggung terdiri dari:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia dengan memperhatikan kesetaraan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

IPG dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan. Nilai IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan

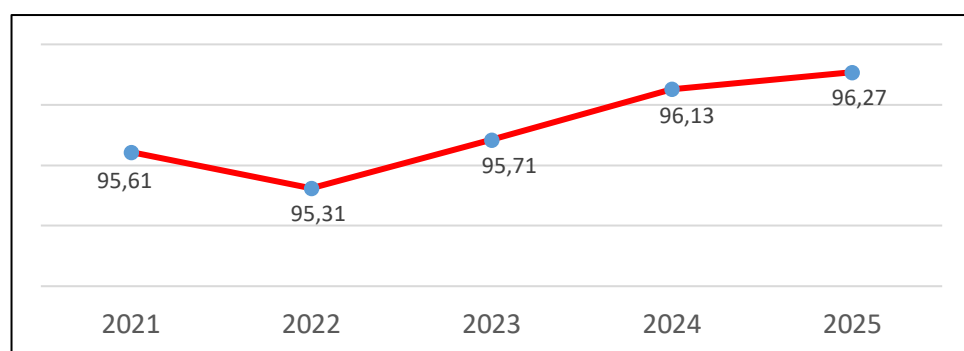
semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang berarti semakin setara akses dan partisipasi keduanya dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi.

Dalam konteks urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan IPG mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan perempuan.
- c. Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- d. Mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.

Dengan demikian, IPG menjadi tolok ukur strategis dalam menilai efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada pengarusutamaan gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Peningkatan nilai IPG secara berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berperspektif gender. Di Kabupaten Temanggung hasil capaian IPG selama 5 tahun terakhir (2021-2025) di peroleh data sebagai berikut:

Gambar 2
Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan data pada Tabel 2, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada tahun 2021, IPG tercatat sebesar 95,62 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 95,31. Penurunan tersebut relatif kecil dan tidak

menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi kesetaraan gender secara umum.

Memasuki tahun 2023, IPG kembali meningkat menjadi 95,71 dan terus menunjukkan tren positif pada tahun 2024 sebesar 96,13 serta tahun 2025 mencapai 96,27. Kenaikan yang terjadi secara bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG tersebut mencerminkan semakin mengecilnya kesenjangan gender di Kabupaten Temanggung serta menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan dan pengarusutamaan gender telah memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan.

b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator yang mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan dan akses yang setara dalam pembangunan dibandingkan laki-laki.

Nilai indeks yang semakin rendah menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil dan kondisi kesetaraan gender yang semakin baik. Oleh karena itu, Indeks Ketimpangan Gender menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang responsif gender guna mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 tercatat sebesar 0,22, nilai ini sama dengan hasil pada tahun 2024 sedangkan dengan target sedikit lebih tinggi yaitu 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Meskipun selisih capaian relatif kecil,

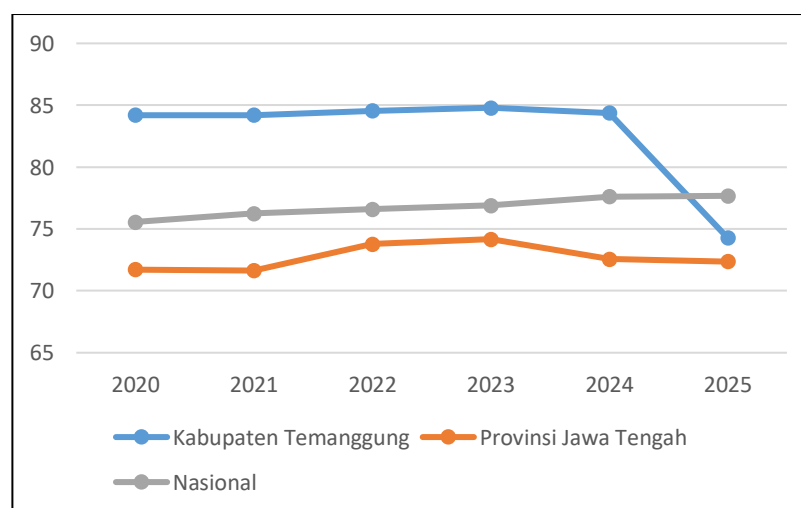
kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan program yang responsif gender, terutama dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, peluang kerja, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan nilai IKG pada tahun berikutnya sehingga target pembangunan kesetaraan gender dapat tercapai secara optimal.

c. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Indeks ini umumnya dilihat dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dan manajerial, serta kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja.

Semakin tinggi nilai Indeks Pemberdayaan Gender, semakin besar peran dan akses perempuan dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, IDG menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan dan mendorong terwujudnya kesetaraan gender yang substantif dalam berbagai sektor kehidupan.

Gambar 3
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)



Tabel 5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

NO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Temanggung	84,21	84,21	84,56	84,8	84,38	74,28
2.	Provinsi Jawa Tengah	71,73	71,64	73,78	74,18	72,58	72,38
3.	Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62	77,68

Sumber data: BPS tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam peran aktif perempuan di berbagai bidang pembangunan, termasuk dalam partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Namun demikian, pada tahun 2024 capaian IDG Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga tahun 2025, di mana nilai IDG kembali mengalami penurunan, sehingga menunjukkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah, capaian IDG Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi, di mana nilai IDG Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 72,38. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan gender di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional yang mencapai 77,68, nilai IDG Kabupaten

Temanggung masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja daerah relatif baik di tingkat provinsi, masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan agar dapat mencapai bahkan melampaui capaian nasional.

d. Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak

Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan dan efektivitas layanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah korban yang mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dengan total kasus kekerasan yang terjadi.

Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa layanan perlindungan, termasuk pengaduan, konseling psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi, dapat diakses secara memadai oleh korban. Sebaliknya, rasio yang rendah menjadi sinyal bahwa masih terdapat keterbatasan akses terhadap layanan, baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, maupun kesadaran masyarakat untuk melapor.

Pemantauan rasio ini penting untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan anak korban kekerasan menerima perlindungan yang cepat, tepat, dan komprehensif. Hasil pemantauan juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan, memperkuat kapasitas lembaga layanan, serta meningkatkan koordinasi antar sektor untuk menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan inklusif.

Berdasarkan data pelayanan yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh korban kekerasan yang tercatat berhasil mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan secara lengkap, termasuk akses pengaduan,

konseling, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Pencapaian rasio 100% ini mencerminkan efektivitas sistem layanan yang responsif gender dan ramah anak di Kabupaten Temanggung. Namun, hal ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan dan penguatan layanan, agar kualitas pendampingan tetap terjaga, seluruh korban mendapatkan akses yang cepat dan tepat, serta masyarakat semakin sadar dan terdorong untuk melaporkan kasus kekerasan.

2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD)

a. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas, kinerja, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing instansi pemerintah. Nilai AKIP mencerminkan sejauh mana Perangkat Daerah telah melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur.

Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah mampu mengelola sumber daya secara efisien, melaksanakan program sesuai target, serta memberikan layanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, nilai yang rendah menandakan perlunya perbaikan dalam tata kelola, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi.

Pemantauan nilai AKIP menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, penetapan prioritas pembangunan, serta evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan capaian kinerja, nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,65, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 67,3, menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Kenaikan nilai AKIP tersebut mencerminkan keberhasilan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Hal ini menjadi dasar penguatan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan kualitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

b. Nilai IKM Perangkat Daerah

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah merupakan indikator utama yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, kejelasan informasi, keramahan petugas, serta ketersediaan fasilitas dan prosedur yang transparan.

Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menilai layanan Perangkat Daerah memadai, responsif, dan memenuhi harapan publik. Sebaliknya, nilai IKM yang rendah menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam kualitas layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan prosedur agar pelayanan publik lebih efektif dan memuaskan.

Pemantauan nilai IKM secara berkala penting untuk meningkatkan kualitas layanan, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan, nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,29, sedikit melampaui target yang ditetapkan yaitu 85,2. Nilai ini juga meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 85,18, menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan responsivitas layanan, termasuk kemudahan akses, kecepatan dan ketepatan pelayanan, serta keramahan petugas. Hasil ini menjadi dasar bagi penguatan kualitas layanan Perangkat Daerah, peningkatan kepuasan masyarakat, dan pemenuhan harapan publik secara berkelanjutan.

3. Indikator Program

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu kunci strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan PUG, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan diperhitungkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara setara, sehingga potensi dan kontribusi seluruh masyarakat dapat dimaksimalkan.

Peran perempuan dalam pembangunan kini semakin nyata dan signifikan. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program pembangunan. Keterlibatan perempuan di berbagai sector ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial membawa perspektif yang lebih berimbang dan inovatif, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Peningkatan efektivitas PUG menuntut berbagai langkah, antara lain: penguatan kapasitas aparatur dan lembaga, penyediaan data berbasis gender, integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. Dengan demikian,

PUG tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi alat nyata untuk memperkuat kesetaraan dan memberdayakan perempuan secara konkret.

Seiring meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG, peran perempuan dalam pembangunan akan semakin optimal. Hal ini tidak hanya mendorong kesejahteraan perempuan itu sendiri, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan, karena pembangunan yang inklusif menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, adil, dan merata.

Ukuran keberhasilan yang digunakan untuk melihat keberhasilan program peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah:

1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Peningkatan persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. ARG memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan secara umum, tetapi juga secara spesifik memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.

Belanja langsung APBD yang dialokasikan secara responsif gender mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan tidak hanya bersifat netral, tetapi juga sensitif terhadap perbedaan kebutuhan dan potensi perempuan dan laki-laki.

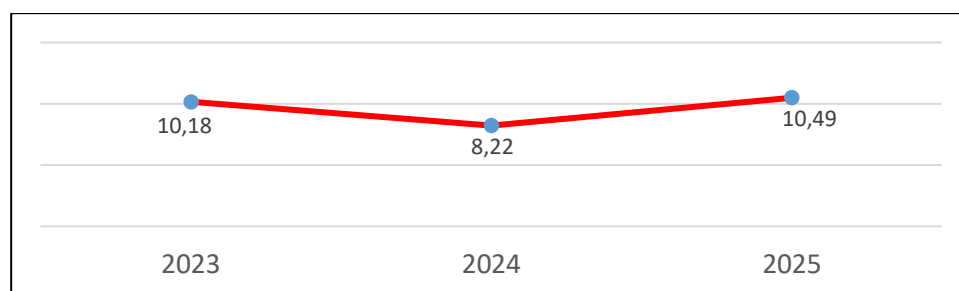
Peningkatan persentase ARG pada belanja langsung APBD juga menunjukkan efektivitas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pula perhatian pemerintah daerah terhadap kesetaraan dan

pemberdayaan perempuan, serta pengurangan kesenjangan gender di berbagai sektor.

Dengan alokasi ARG yang memadai dan terukur, pembangunan daerah tidak hanya menjadi lebih inklusif, tetapi juga lebih berkelanjutan. Hal ini memungkinkan terciptanya program-program yang efektif, memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, dan memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang ada selama 3 tahun terakhir capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4
Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada
Belanja Langsung APBD Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan data yang tersedia selama tiga tahun terakhir, persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menunjukkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2023, persentase ARG mencapai 10,18%, menandakan komitmen awal pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 8,22%, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan strategi perencanaan serta penganggaran responsif gender. Penurunan ini menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap sensitif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan.

Di tahun 2025, persentase ARG kembali meningkat menjadi 10,49%, melampaui capaian tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah

dalam memperbaiki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan. Tren ini menunjukkan adanya perhatian yang konsisten terhadap integrasi gender dalam belanja langsung APBD, sehingga program pembangunan menjadi lebih inklusif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Persentase Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Pemerintah

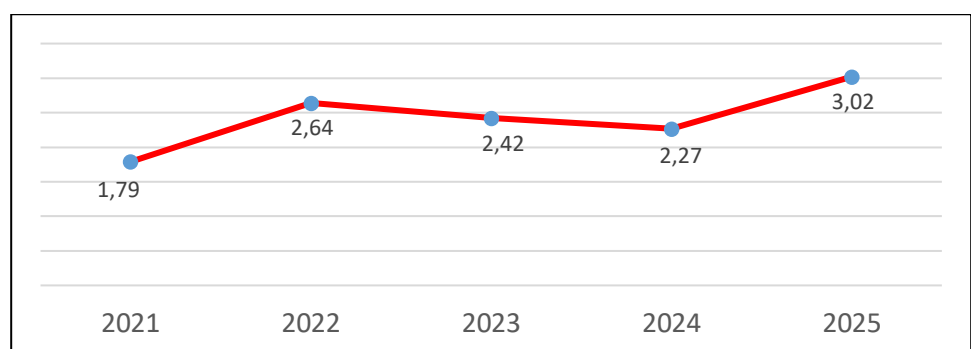
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi dan peran perempuan dalam struktur pemerintahan, baik pada jabatan struktural, fungsional, maupun posisi pengambilan keputusan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan.

Semakin tinggi persentase keterwakilan perempuan, semakin menunjukkan adanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan strategis. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak.

Dengan demikian, peningkatan persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender, memperluas ruang partisipasi perempuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Selama 5 tahun terakhir (2021-2025) di Kabupaten Temanggung capaian keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 5
Capaian Keterwakilan Perempuan Di Lembaga
Pemerintah Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan data selama lima tahun terakhir (2021–2025), capaian keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 1,79. Angka ini kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 2,64, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam membuka ruang partisipasi perempuan di lingkungan pemerintahan.

Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi 2,42 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 2,27. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh dinamika mutasi jabatan, promosi, maupun faktor struktural lainnya dalam sistem kepegawaian. Meskipun demikian, penurunan tersebut masih berada dalam rentang yang relatif stabil.

Memasuki tahun 2025, keterwakilan perempuan kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,02, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan

adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender serta memperluas kesempatan perempuan untuk berperan dalam lembaga pemerintahan.

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, diperlukan konsistensi kebijakan dan strategi yang berkelanjutan agar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan merupakan upaya strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

Perlindungan perempuan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga mencakup pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan korban agar dapat kembali berfungsi secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta dunia usaha.

Di Kabupaten Temanggung ukuran keberhasilan program perlindungan perempuan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu:

1) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan hak perempuan. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan

berbasis gender terus meningkat, tidak semua korban berani atau mampu melaporkan kasus yang dialaminya. Berbagai faktor seperti rasa takut, stigma sosial, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, hingga kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pelaporan.

Dari total kasus kekerasan yang terjadi, hanya sebagian yang benar-benar tercatat secara resmi karena dilaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga layanan. Artinya, angka pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Di antara kasus yang telah dilaporkan, tingkat penanganannya pun bervariasi. Beberapa kasus dapat diproses hingga tahap hukum dan pendampingan psikologis, sementara sebagian lainnya menghadapi kendala administratif, kurangnya bukti, atau keterbatasan sumber daya aparat dan lembaga pendamping.

Persentase kasus yang tertangani dengan baik biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan layanan terpadu, respons cepat aparat, dukungan regulasi yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Semakin baik sistem pendukung yang tersedia, semakin tinggi pula peluang korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Oleh karena itu, peningkatan persentase pelaporan dan penanganan kasus tidak hanya bergantung pada keberanian korban, tetapi juga pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan bebas dari stigma. Edukasi publik, penguatan mekanisme perlindungan, serta jaminan kerahasiaan dan keamanan korban menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani secara adil dan menyeluruh.

Pada tahun 2025, di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 6 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke DPPPAPPKB. Seluruh kasus yang dilaporkan

tersebut telah mendapatkan pelayanan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memberikan respons yang cepat dan menyeluruh terhadap korban kekerasan.

Dari total 6 kasus tersebut, jenis kekerasan yang dialami korban bervariasi, meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta penelantaran. Variasi jenis kekerasan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang tampak secara fisik maupun yang berdampak secara emosional dan psikologis.

Fakta bahwa seluruh kasus yang dilaporkan telah mendapatkan pelayanan mencerminkan adanya sistem penanganan yang berjalan dengan baik, termasuk pemberian pendampingan, perlindungan, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan korban. Hal ini menjadi indikator positif dalam upaya perlindungan perempuan di Kabupaten Temanggung.

Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif terbatas, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar korban tidak ragu untuk melapor. Upaya pencegahan, edukasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi tetap diperlukan guna memastikan setiap perempuan mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang optimal dari segala bentuk kekerasan.

2) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), per 100.000 penduduk perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kerentanan serta gambaran umum situasi perlindungan perempuan di suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam satu tahun dengan jumlah total penduduk perempuan, kemudian dikalikan 100.000.

Penggunaan rasio per 100.000 penduduk perempuan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih

proporsional dan objektif. Dengan metode ini, angka kasus tidak hanya dilihat dari jumlah absolut, tetapi juga mempertimbangkan besar kecilnya populasi perempuan di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar wilayah maupun antar periode waktu.

Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, semakin besar tingkat kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di wilayah tersebut. Namun demikian, peningkatan rasio tidak selalu sepenuhnya mencerminkan peningkatan kejadian kekerasan. Dalam beberapa kasus, kenaikan rasio dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor, serta membaiknya sistem pencatatan dan pelaporan kasus, termasuk kasus TPPO.

Sebaliknya, rasio yang rendah perlu dianalisis secara hati-hati. Angka yang rendah bisa menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan dan perlindungan, tetapi juga dapat mengindikasikan masih adanya kasus yang belum terungkap atau tidak dilaporkan.

Oleh karena itu, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penguatan layanan perlindungan, peningkatan sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 5,62 per 100.000 penduduk perempuan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5,39, serta mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 5,6 per 100.000 penduduk.

Kenaikan rasio sebesar 0,02 poin dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kasus yang tercatat atau dilaporkan. Meskipun selisihnya relatif kecil,

capaian ini tetap memerlukan perhatian karena belum memenuhi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja daerah.

Perlu dicermati bahwa peningkatan rasio tidak selalu sepenuhnya mencerminkan peningkatan kejadian kekerasan secara faktual. Kenaikan angka dapat pula dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, membaiknya sistem pendataan, serta optimalnya mekanisme penanganan kasus, termasuk kasus TPPO. Dengan demikian, interpretasi data perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung.

Ke depan, diperlukan penguatan upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar rasio kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan sesuai target yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang optimal.

c. Program Peningkatan kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan upaya strategis dalam membangun fondasi masyarakat yang kuat, setara, dan berkeadilan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran sentral dalam membentuk nilai, pola asuh, serta relasi yang sehat antar anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kualitas keluarga menjadi kunci dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas keluarga melalui edukasi pengasuhan yang responsif gender, peningkatan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, serta penguatan komunikasi dan relasi yang harmonis di dalam rumah tangga. Dengan membangun kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, peran, dan kesempatan yang setara, diharapkan tidak terjadi diskriminasi maupun kekerasan dalam lingkup keluarga.

Selain itu, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan ramah anak, di mana setiap anak memperoleh hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Keluarga yang berkualitas akan lebih mampu mendeteksi dan mencegah potensi kekerasan sejak dini, serta berperan aktif dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh anggotanya.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan komunitas, program peningkatan kualitas keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat nilai kesetaraan, serta memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat tumbuh dan berkembang, tetapi juga menjadi ruang yang adil, aman, dan mendukung kesejahteraan bersama.

Untuk mengukur keberhasilan program peningkatan kualitas keluarga indikator yang digunakan adalah persentase pelayanan ramah anak di puskesmas. Indikator persentase pelayanan ramah anak di puskesmas, menunjukkan sejauh mana fasilitas kesehatan tingkat pertama telah memenuhi standar pelayanan yang aman, nyaman, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Persentase ini dihitung dari jumlah puskesmas yang memenuhi kriteria pelayanan ramah anak dibandingkan dengan total puskesmas yang ada, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik komitmen dan kualitas pelayanan kesehatan dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pada tahun 2025, di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 17 dari 26 puskesmas yang ada telah memberikan pelayanan ramah anak. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah berupaya memenuhi standar pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dengan capaian tersebut, persentase puskesmas yang telah menerapkan pelayanan ramah anak mencapai sekitar 65,38%. Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan agar seluruh puskesmas dapat memenuhi standar pelayanan ramah anak secara menyeluruh.

d. Program Pemenuhan Hak Anak

Program pemenuhan hak anak merupakan upaya strategis untuk menjamin terpenuhinya hak seluruh anak secara komprehensif, tanpa diskriminasi. Program ini dilaksanakan dengan memastikan setiap anak memperoleh hak dasar seperti hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan hukum. Melalui sinergi lintas perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan partisipasi keluarga, program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan adanya program pemenuhan hak anak, diharapkan seluruh anak dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional sesuai dengan potensi yang dimiliki. Program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pembangunan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan program pemenuhan hak anak ada 2 indikator yang digunakan yaitu:

1) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Temanggung merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara

terintegrasi dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang harus dipenuhi hak-haknya serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pelaksanaan KLA di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui penguatan kebijakan yang responsif terhadap hak anak, pengembangan layanan ramah anak di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang publik, serta peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

Melalui implementasi Kabupaten Layak Anak, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh anak di Kabupaten Temanggung, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen daerah dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas dalam pembangunan.

Pada tahun 2025, penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Temanggung tidak dilakukan, sehingga predikat KLA masih sama dengan tahun 2024 dengan katagori Madya.

Meskipun tidak ada penilaian baru, predikat Madya menunjukkan komitmen Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan, penguatan kebijakan, dan sinergi lintas sektor agar Kabupaten Temanggung dapat mencapai predikat KLA yang lebih tinggi, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah anak.

2) Persentase terbentuknya DRPPA

Persentase terbentuknya DRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak) merupakan indikator penting untuk mengukur keterlibatan desa dan kelurahan

dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta anak. Indikator ini menunjukkan sejauh mana setiap desa atau kelurahan telah membentuk forum atau struktur DRPPA yang berfungsi sebagai wadah perencanaan, pengawasan, dan advokasi terkait pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan.

Persentase ini dihitung dari jumlah desa/kelurahan yang telah terbentuk DRPPA dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang ada, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentasenya, semakin luas penerapan prinsip ramah perempuan dan peduli anak di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi komunitas dalam menjaga hak, keamanan, dan kesejahteraan perempuan dan anak.

Indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga setiap perempuan dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Sampai dengan tahun 2025, di Kabupaten Temanggung dari 289 desa/kelurahan, tercatat sebanyak 19 desa/kelurahan yang telah membentuk DRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak). Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil wilayah telah memiliki forum yang berfungsi untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan di tingkat desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya DRPPA, desa/kelurahan tersebut dapat merencanakan, mengawasi, dan mendorong program yang ramah perempuan serta peduli anak, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Meskipun persentasenya masih relatif rendah, upaya ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperluas

penerapan prinsip ramah perempuan dan peduli anak di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau mengalami risiko tinggi, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun anak dengan kebutuhan khusus. Program ini bertujuan memastikan setiap anak memperoleh haknya secara penuh, mendapatkan perlindungan dari bahaya, dan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pelaksanaan program ini meliputi identifikasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pemberian pendampingan psikologis, layanan kesehatan, akses pendidikan, serta perlindungan hukum. Selain itu, program ini juga menekankan koordinasi lintas sektor antara dinas sosial, pendidikan, kesehatan, aparat hukum, serta masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan program perlindungan khusus anak, diharapkan setiap anak yang berada dalam situasi rentan dapat memperoleh rasa aman, dukungan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga hak-hak mereka sebagai anak terlindungi secara menyeluruh.

Untuk mengukur keberhasilan program ini indikator yang digunakan ada 4 (empat) indikator yaitu:

1) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi di suatu wilayah atau negara. Indeks ini tidak hanya mengukur kondisi fisik anak, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan kata lain, IPA mencerminkan kualitas kehidupan anak serta efektivitas

kebijakan pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Indeks ini biasanya dibangun berdasarkan beberapa indikator penting, seperti akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Semakin tinggi skor IPA, semakin baik perlindungan anak di wilayah tersebut. Sebaliknya, skor yang rendah menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk risiko kekerasan, pengabaian, atau kurangnya fasilitas yang mendukung perkembangan mereka.

Pentingnya Indeks Perlindungan Anak terletak pada kemampuannya untuk menjadi peta bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam merancang program intervensi yang tepat sasaran. Dengan memahami area-area yang masih lemah, upaya perlindungan dapat lebih terfokus, mulai dari penguatan pendidikan, layanan kesehatan yang inklusif, hingga mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, IPA bukan sekadar angka, melainkan cermin dari komitmen sebuah masyarakat terhadap masa depan anak-anaknya. Perlindungan anak yang optimal bukan hanya tanggung jawab orang tua atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, Indeks Perlindungan Anak (IPA) tercatat sebesar 61,62. Angka ini mencerminkan tingkat perlindungan anak yang berada pada kategori menengah, menunjukkan bahwa sebagian hak-hak anak telah terpenuhi, namun masih ada ruang untuk perbaikan.

Indeks ini mencakup berbagai aspek penting, seperti akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan hukum dari kekerasan dan eksploitasi. Skor 61,62 menandakan bahwa meskipun sebagian besar anak di Temanggung mendapatkan perlindungan dasar, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal layanan yang merata dan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak yang rentan.

Data ini menjadi alat evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan dan program yang lebih fokus. Misalnya, memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan fasilitas kesehatan anak, serta memperkuat kampanye dan layanan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dengan adanya Indeks Perlindungan Anak ini, masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat bekerja sama, memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.

2) Persentase pernikahan usia anak

Persentase pernikahan usia anak adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa besar proporsi anak-anak di bawah usia 19 tahun yang telah menikah. Pernikahan anak merupakan salah satu isu serius karena berdampak langsung pada hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Anak yang menikah terlalu dini berisiko menghadapi putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Data persentase pernikahan anak memberikan gambaran tentang tantangan yang masih dihadapi masyarakat dalam menegakkan hak anak. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar jumlah anak yang

kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, penurunan persentase menunjukkan adanya upaya efektif dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan anak.

Pemahaman terhadap data ini sangat penting untuk merancang kebijakan perlindungan anak yang tepat sasaran. Strategi pencegahan bisa berupa pendidikan seksual dan reproduksi sejak dini, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penegakan hukum yang melarang pernikahan anak. Dengan demikian, menurunkan persentase pernikahan anak bukan hanya sekadar target angka, tetapi merupakan langkah konkret untuk memastikan setiap anak memiliki masa depan yang aman, sehat, dan penuh kesempatan.

Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat sebanyak 153 anak usia di bawah 19 tahun yang telah menikah, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 274 anak. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan pernikahan anak, meskipun jumlah tersebut masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.

Pernikahan anak memiliki dampak yang luas, termasuk risiko putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, serta keterbatasan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Penurunan jumlah anak yang menikah di bawah umur ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak, mulai dari edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, pemberdayaan keluarga, hingga penegakan hukum yang lebih tegas.

Data ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat strategi pencegahan, memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta memiliki hak yang sama untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

3) Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani

Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas sistem perlindungan anak di suatu wilayah. Angka ini menunjukkan seberapa banyak anak korban kekerasan yang berani melapor, serta seberapa efektif lembaga terkait menindaklanjuti laporan tersebut.

Kasus kekerasan anak bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Tingginya persentase penanganan menunjukkan bahwa korban mendapatkan dukungan yang tepat, mulai dari perlindungan hukum, konseling psikologis, hingga pemulihan sosial. Sebaliknya, rendahnya persentase pelaporan atau penanganan sering mencerminkan adanya hambatan, seperti stigma sosial, kurangnya akses informasi, atau minimnya mekanisme pelaporan yang ramah anak.

Data ini menjadi alat evaluasi penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial untuk memperkuat strategi perlindungan anak. Upaya yang bisa dilakukan antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak, memperluas akses layanan pengaduan, melatih petugas dalam menangani kasus kekerasan anak secara sensitif, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.

Dengan meningkatnya persentase kasus yang dilaporkan dan ditangani, masyarakat dapat memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, serta hak-hak mereka dihormati dan dijamin.

Pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat sebanyak 20 anak menjadi korban kekerasan. Seluruh kasus tersebut telah ditangani dengan baik, di mana semua anak korban menerima pelayanan dan perlindungan yang sesuai. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam

memastikan hak-hak anak terlindungi dan setiap korban mendapatkan bantuan yang tepat.

Penanganan ini mencakup perlindungan hukum, layanan konseling psikologis, serta pendampingan sosial untuk memulihkan kondisi anak korban. Data ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Temanggung berjalan efektif dalam menindaklanjuti laporan kekerasan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melaporkan kasus serupa.

Meskipun jumlah korban relatif kecil, penting untuk terus meningkatkan upaya pencegahan kekerasan anak melalui edukasi masyarakat, sosialisasi hak-hak anak, serta penguatan mekanisme pelaporan yang ramah anak. Dengan demikian, setiap anak di Kabupaten Temanggung dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi sepenuhnya.

4) Rasio kasus kekerasan terhadap anak

Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah indikator penting yang menggambarkan perbandingan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dengan jumlah total populasi anak di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat risiko yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran.

Semakin tinggi rasio kasus kekerasan, semakin besar ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak, serta menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Sebaliknya, rasio yang rendah menandakan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang relatif aman dan terlindungi, serta adanya sistem perlindungan anak yang efektif.

Rasio ini menjadi alat evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan perlindungan anak, mulai dari mekanisme pelaporan, penegakan hukum, hingga program pencegahan kekerasan. Dengan memahami rasio kasus kekerasan, pemerintah dan masyarakat dapat

merancang strategi intervensi yang tepat, misalnya edukasi keluarga, pelatihan bagi tenaga pendamping anak, serta kampanye kesadaran publik.

Mengurangi rasio kasus kekerasan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Upaya ini penting agar setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.

Pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat rasio kasus kekerasan terhadap anak sebesar 8,79, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 8,93. Angka ini juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 9,37. Penurunan rasio ini menjadi indikasi positif bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di wilayah ini mulai membuahkan hasil.

Rasio ini mencerminkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak per populasi anak tertentu, sehingga semakin rendah angkanya, semakin kecil risiko anak-anak mengalami kekerasan. Penurunan rasio tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program perlindungan anak, mulai dari edukasi masyarakat, sosialisasi hak anak, penguatan mekanisme pelaporan, hingga penanganan kasus oleh lembaga terkait.

Meski terjadi penurunan, tetap penting untuk menjaga tren positif ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses layanan perlindungan anak, serta memastikan setiap laporan kekerasan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan demikian, anak-anak di Kabupaten Temanggung dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi sepenuhnya.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kondisi geografis dan demografis suatu wilayah memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Karakteristik geografis wilayah, seperti luas wilayah, kondisi topografi, aksesibilitas antarwilayah, serta persebaran permukiman penduduk, mempengaruhi jangkauan dan efektivitas pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Wilayah dengan kondisi geografis yang luas, berbukit, atau memiliki permukiman yang tersebar dapat menjadi tantangan dalam penyediaan layanan keluarga berencana, terutama dalam hal distribusi tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB), ketersediaan fasilitas pelayanan kontrasepsi, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan keluarga di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelayanan yang adaptif, seperti penguatan jejaring pelayanan hingga tingkat desa/kelurahan, pelayanan KB keliling, serta optimalisasi peran kader dan institusi masyarakat guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi dan pelayanan keluarga berencana.

Di sisi lain, aspek demografi menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan dan program dalam pengendalian penduduk. Kondisi demografi yang meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, struktur umur penduduk, serta tingkat kelahiran dan kematian memberikan gambaran mengenai dinamika perkembangan penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya, pelayanan publik, serta daya dukung lingkungan apabila tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang memadai. Dalam hal ini, program keluarga berencana berperan penting sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran yang terencana dan bertanggung jawab.

Selain itu, struktur umur penduduk juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kependudukan. Proporsi penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi potensi bonus demografi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, namun juga dapat menimbulkan berbagai

permasalahan apabila tidak diiringi dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas keluarga. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terpadu, diharapkan dapat terwujud keseimbangan antara jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta daya dukung lingkungan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta terwujudnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

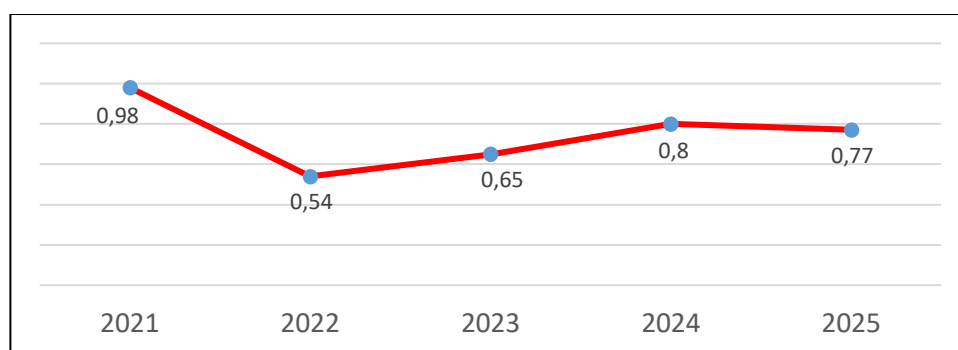
Ukuran keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari aspek geografi dan demografi salah satunya diukur melalui indikator

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Indikator ini menggambarkan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan serta ketersediaan sumber daya pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2025



Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif namun tetap berada pada kisaran yang stabil. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,98 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan mengalami penurunan cukup signifikan menjadi

0,54 persen. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 0,65 persen. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan angka pertumbuhan mencapai 0,8 persen. Namun demikian, pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk sedikit menurun menjadi 0,77 persen.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung masih berada pada tingkat yang terkendali, sampai saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung sebanyak 825.041 jiwa (laki-laki sebanyak 416.044 jiwa dan perempuan sebanyak 408,997 jiwa) .

Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, seperti peningkatan kesertaan ber-KB, penyuluhan kepada pasangan usia subur, serta penguatan peran penyuluh keluarga berencana dan kader di masyarakat, telah memberikan kontribusi positif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, pengendalian laju pertumbuhan penduduk diharapkan dapat terus mendukung terciptanya keseimbangan antara jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak hanya berfokus pada pengaturan kelahiran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui perencanaan keluarga yang baik, setiap keluarga diharapkan mampu merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara tepat sehingga dapat memberikan perhatian,

pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ini dilakukan melalui berbagai program pembangunan keluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkualitas, sehat, dan mandiri. Program tersebut meliputi peningkatan kesertaan pasangan usia subur dalam penggunaan alat dan metode kontrasepsi, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan pola pengasuhan yang berkualitas.

Pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang lebih seimbang dengan kapasitas pembangunan daerah. Dengan jumlah anggota keluarga yang terencana, diharapkan setiap keluarga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi anggota keluarganya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan pada aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung diukur melalui 2 indikator:

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari aspek kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini menggambarkan tingkat kualitas pembangunan keluarga yang dilihat dari berbagai dimensi kehidupan keluarga, yang meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

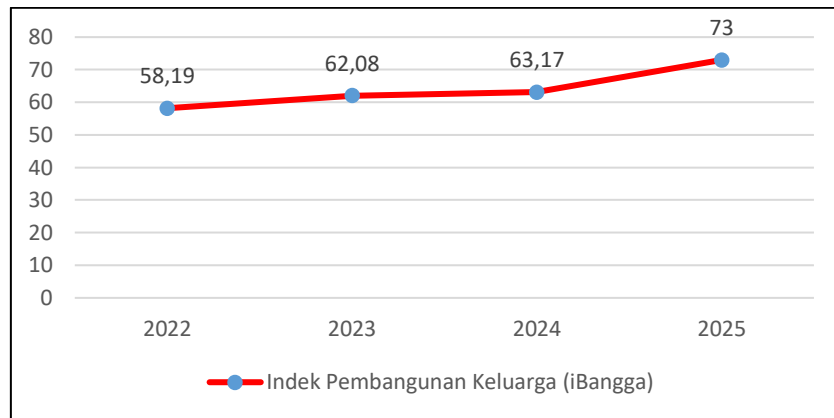
Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat menilai sejauh mana keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan fungsi keluarga secara optimal, serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keluarga yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program-program tersebut meliputi pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, penguatan fungsi keluarga, serta peningkatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan setiap keluarga mampu berkembang menjadi keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

Peningkatan nilai iBangga menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas kehidupan keluarga di masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui sinergi tersebut diharapkan pembangunan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program keluarga berencana, tetapi juga menjadi gambaran komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan keluarga di suatu wilayah. Peningkatan nilai iBangga diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Gambar 7
Indek Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2025



Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai iBangga tercatat sebesar 58,19. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 62,08, atau naik sebesar 3,89 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 63,17, meskipun kenaikannya relatif lebih kecil yaitu 1,09 poin dari tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang cukup signifikan, di mana nilai iBangga Kabupaten Temanggung mencapai 73 atau meningkat 9,83 poin dibandingkan tahun 2024.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, nilai iBangga Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 14,81 poin. Tren ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup positif dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung, yang mencerminkan semakin meningkatnya kualitas ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga di daerah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tingkat yang lebih tinggi. Nilai iBangga tersebut dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

- 1) Dimensi Ketenteraman, dengan nilai 79,9;
- 2) Dimensi Kemandirian, dengan nilai 74,6; dan
- 3) Dimensi Kebahagiaan, dengan nilai 64,6.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pembangunan keluarga masih perlu terus

ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berbagai intervensi program seperti pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia perlu terus dioptimalkan. Dengan demikian diharapkan nilai Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga mampu mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

b. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun

Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR). TFR merupakan indikator demografi yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yaitu pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) usia 15–49 tahun, dengan asumsi perempuan tersebut mengalami pola fertilitas sesuai dengan kondisi pada tahun tertentu.

Nilai TFR menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Semakin rendah angka TFR menunjukkan bahwa tingkat kelahiran cenderung lebih terkendali, sehingga dapat mendukung upaya menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan serta kapasitas pembangunan daerah. Sebaliknya, angka TFR yang tinggi dapat mencerminkan masih tingginya tingkat kelahiran yang berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk.

Upaya pengendalian angka TFR dilakukan melalui berbagai program keluarga berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pasangan usia subur, dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara ideal. Program tersebut meliputi peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta penguatan peran tenaga penyuluh keluarga berencana dan kader di tingkat masyarakat.

Melalui pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkelanjutan, diharapkan angka kelahiran total dapat terjaga pada tingkat yang ideal. Kondisi tersebut akan mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2025 angka TFR di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 1,24, lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2,18. Capaian tersebut juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024, di mana angka TFR tercatat sebesar 2,19.

Penurunan angka TFR tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam pola fertilitas masyarakat, yang salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak melalui program keluarga berencana. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyuluhan kepada pasangan usia subur, serta penguatan peran penyuluh keluarga berencana di tingkat masyarakat juga turut memberikan kontribusi dalam pengendalian tingkat kelahiran.

Meskipun demikian, capaian tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut agar tetap selaras dengan target pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan. Melalui penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkelanjutan, diharapkan tingkat fertilitas dapat terjaga pada kondisi yang ideal sehingga mendukung terwujudnya keluarga berkualitas serta keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.

3. Indikator Program

a. Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menjaga terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk agar sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan kemampuan penyediaan layanan publik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan berbagai tantangan pembangunan, seperti tekanan terhadap sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Program pengendalian penduduk dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keluarga, penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta penyediaan akses pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Selain itu, program ini juga didukung oleh penguatan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), kader masyarakat, serta lembaga terkait dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga agar mampu merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara tepat.

Pelaksanaan program pengendalian penduduk tidak hanya bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah anggota keluarga yang terencana, setiap keluarga dapat memberikan perhatian yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarganya.

Melalui program pengendalian penduduk yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan jumlah penduduk tetap terkendali, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan daerah yang seimbang dan berkelanjutan.

Ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ini ada 4 (empat) indikator yaitu:

1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan di suatu wilayah telah mengintegrasikan isu kependudukan secara menyeluruh dan strategis. Indeks ini menggambarkan kualitas pembangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip kependudukan seperti kesetaraan, inklusivitas, partisipasi, keberlanjutan, dan pendekatan holistik-integratif agar penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Nilai IPBK dinyatakan pada skala 0–100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan di daerah tersebut.

Di Kabupaten Temanggung, IPBK digunakan sebagai tolok ukur dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan serta keluarga berencana. Melalui IPBK, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas program intervensi yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya program pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, penguatan peran keluarga dalam pembangunan, serta upaya peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pelaksanaan evaluasi IPBK turut melibatkan pendataan dan pengisian instrumen IPBK oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas fungsi keluarga dan program kependudukan di tingkat kabupaten. Hasil evaluasi IPBK ini kemudian menjadi bahan diskusi dan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki capaian pembangunan berwawasan kependudukan ke depan.

Dengan terus mendorong peningkatan nilai IPBK, Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk memperkuat pembangunan yang berwawasan kependudukan sehingga mampu menciptakan masyarakat

yang sejahtera, tangguh, dan berdaya saing. Integrasi isu kependudukan dalam seluruh aspek pembangunan diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2025 angka IPBK di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 60,1, melampaui target yang ditetapkan yaitu 58,7. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana angka IPBK pada tahun 2024 tercatat sebesar 58,6.

Peningkatan IPBK ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk program pengendalian pertumbuhan penduduk, pembinaan ketahanan keluarga, penyuluhan keluarga berencana, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia, telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan berwawasan kependudukan.

Capaian tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong pelaksanaan program-program yang meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan secara berkelanjutan, seimbang, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed}

Persentase pasangan usia subur yang mengalami *unmetneed* KB menggambarkan besarnya kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi di masyarakat. *Unmetneed* terjadi ketika pasangan ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, namun tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

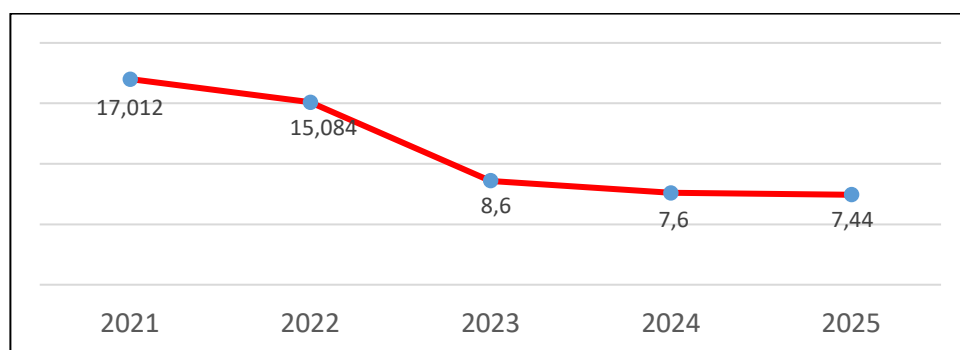
Fenomena ini menjadi indikator penting dalam program keluarga berencana, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan pasangan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran dengan akses nyata terhadap

layanan KB. Faktor-faktor yang menyebabkan unmetneed antara lain kurangnya informasi tentang metode KB, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, biaya, hambatan sosial atau budaya, serta kekhawatiran terhadap efek samping alat kontrasepsi.

Tingginya persentase *unmetneed* memiliki dampak langsung pada kesehatan ibu dan anak, termasuk risiko kehamilan tidak diinginkan, persalinan berisiko, dan pertumbuhan keluarga yang kurang terencana. Oleh karena itu, upaya menurunkan angka *unmetneed* melalui edukasi, penyediaan berbagai metode kontrasepsi, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB menjadi strategi utama untuk mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang dicatat di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8
Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber-KB
Tidak Terpenuhi {Unmetneed} Tahun 2021-2025



Persentase pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Temanggung yang keinginannya untuk ber-KB belum terpenuhi (*unmetneed*) selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, persentase *unmetneed* tercatat sebesar 17,012 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 15,084 persen. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana persentase *unmetneed* turun menjadi 8,6 persen. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan angka sebesar 7,6 persen,

dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 7,44 persen.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021–2025 terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam pemenuhan kebutuhan layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur di Kabupaten Temanggung. Penurunan persentase *unmetneed* ini mengindikasikan bahwa akses dan pemanfaatan layanan KB oleh masyarakat semakin meningkat, sehingga semakin banyak pasangan usia subur yang dapat memperoleh pelayanan KB sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung. Upaya edukasi, penyediaan metode kontrasepsi, dan peningkatan akses layanan KB berkontribusi terhadap keberhasilan ini. Namun, angka *unmetneed* yang masih ada menandakan bahwa masih ada sebagian pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum mendapatkan layanan KB sesuai kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan dan penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB, agar target pemenuhan kebutuhan keluarga berencana dapat tercapai secara optimal dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

3) Median usia kawin pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) merupakan indikator penting dalam studi demografi dan kesehatan reproduksi. MUKP menunjukkan usia di mana separuh dari jumlah penduduk telah menikah untuk pertama kalinya. Indikator ini digunakan untuk memahami pola pernikahan, perilaku reproduksi, serta perencanaan keluarga di suatu wilayah.

Usia kawin pertama yang relatif lebih tinggi biasanya berkaitan dengan penundaan kehamilan, pendidikan yang

lebih panjang, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, terutama bagi perempuan. Sebaliknya, usia kawin pertama yang rendah dapat meningkatkan risiko kehamilan remaja, pernikahan dini, dan potensi masalah kesehatan bagi ibu dan anak.

Dengan memantau MUKP secara rutin, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran tentang perencanaan keluarga, serta menurunkan risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini. MUKP juga membantu mengukur dampak program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan terhadap pola pernikahan di masyarakat.

Berdasarkan data yang tercatat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) mencapai 22 tahun, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 19,9 tahun dan meningkat dari tahun 2024 yang tercatat 19,8 tahun. Meski MUKP menunjukkan tren kenaikan, data juga mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat 153 orang yang menikah di bawah usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata usia kawin pertama meningkat, masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan dini.

Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan program pendidikan, pembinaan keluarga, dan kesadaran akan pentingnya menikah pada usia yang ideal, sehingga perkawinan dini dapat ditekan dan kualitas kehidupan keluarga muda meningkat.

4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)

Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15–19 tahun merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada perempuan usia 15–19 tahun dalam periode tertentu, biasanya per 1.000 perempuan pada

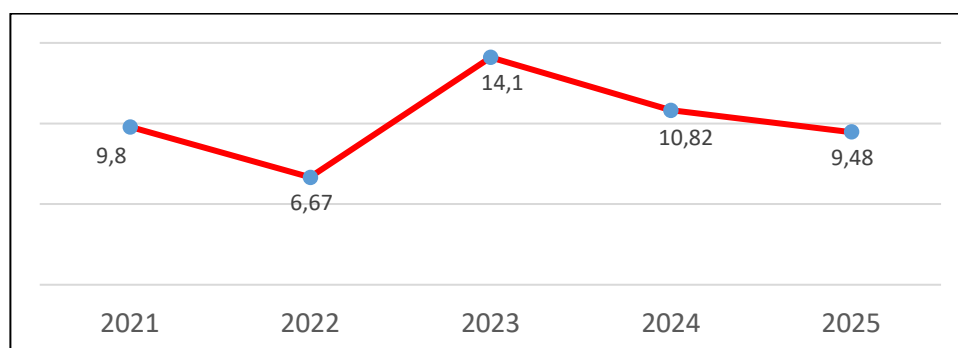
kelompok usia yang sama. Indikator ini penting untuk menggambarkan tingkat kelahiran pada kelompok remaja serta menjadi salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan program kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga.

ASFR 15–19 tahun juga mencerminkan tingkat kejadian kehamilan dan persalinan pada usia remaja. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak remaja yang mengalami kehamilan dan melahirkan pada usia yang relatif muda. Kondisi ini dapat berdampak pada berbagai aspek, baik kesehatan ibu dan bayi, keberlanjutan pendidikan remaja, maupun kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Sebaliknya, penurunan angka kelahiran remaja menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, penundaan usia perkawinan, serta efektivitas program edukasi dan pelayanan keluarga berencana bagi remaja. Oleh karena itu, pengendalian ASFR 15–19 tahun menjadi salah satu fokus penting dalam upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan siap membangun keluarga pada usia yang lebih matang.

Data Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15–19 tahun di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini.

Gambar 9
Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun Atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15–19 Tahun Pada Tahun 2021-2025



Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR* 15–19 tahun) di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, ASFR 15–19 tahun tercatat sebesar 9,8 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun. Pada tahun 2022, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 6,67, yang merupakan nilai terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun *demikian*, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana ASFR 15–19 tahun mencapai 14,1. Setelah itu, angka kelahiran remaja kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 10,82 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 9,48.

Secara umum, meskipun terjadi lonjakan pada tahun 2023, tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan dengan tahun tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja di Kabupaten Temanggung masih perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan program edukasi kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta peningkatan akses informasi dan layanan bagi remaja guna menekan angka kelahiran pada usia muda.

b. Program Pembinaan KB

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kehidupan berkeluarga serta pengendalian jumlah kelahiran.

Pelaksanaan Program Pembinaan KB di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui penguatan pelayanan keluarga berencana, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, serta pembinaan kepada pasangan usia subur agar dapat merencanakan jumlah dan jarak

kelahiran anak secara lebih baik. Selain itu, program ini juga didukung oleh kegiatan penyuluhan, pendampingan oleh tenaga penyuluh keluarga berencana, serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Program Pembinaan KB juga diarahkan untuk mendukung program pembangunan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Melalui kelompok-kelompok kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai pengasuhan anak, kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, Program Pembinaan KB di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, menurunkan angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta mendukung terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sebagai bagian dari pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Untuk mengukur keberhasilan program pembinaan KB di Kabupaten Temanggung menggunakan 4 ukuran indikator yaitu:

1) Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam program keluarga berencana. MKJP meliputi beberapa metode kontrasepsi seperti IUD (alat kontrasepsi dalam rahim), implan, metode operasi wanita (MOW), dan metode operasi pria (MOP) yang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Tingginya persentase keberhasilan pemakaian MKJP menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi tersebut berjalan dengan baik dan mampu memberikan perlindungan yang efektif dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini juga mencerminkan

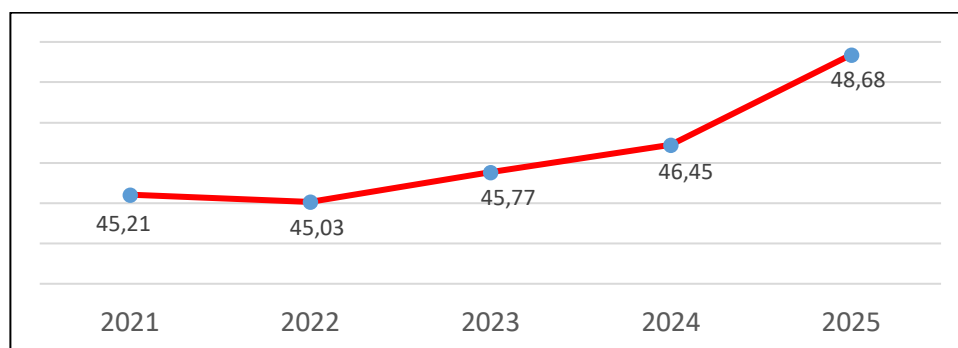
meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi jangka panjang, yang dinilai lebih praktis, aman, dan efisien dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek.

Selain itu, keberhasilan pemakaian MKJP juga tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana dan dibantu oleh Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam memberikan edukasi, konseling, serta pelayanan yang berkualitas kepada pasangan usia subur. Melalui upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Dengan meningkatnya keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, diharapkan program keluarga berencana dapat berjalan lebih optimal dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Dalam lima tahun terakhir persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tahun 2021-2025 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini.

Gambar 10
Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2021-2025



Berdasarkan data pada Gambar 9, persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, persentase keberhasilan

pemakaian MKJP tercatat sebesar 45,21 persen. Pada tahun 2022 angka tersebut sedikit menurun menjadi 45,03 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 45,77 persen. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan persentase mencapai 46,45 persen. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2025, di mana persentase keberhasilan pemakaian MKJP mencapai 48,68 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Secara umum, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang oleh pasangan usia subur di Kabupaten Temanggung. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi, edukasi, serta pelayanan keluarga berencana yang mendorong penggunaan MKJP semakin efektif, sehingga masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berjangka panjang.

2) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*modern contraceptive prevalence rate / mCPR*) merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern, seperti pil, suntik, kondom, IUD, implan, maupun metode operasi (MOW/MOP), dari seluruh pasangan usia subur yang aktif secara seksual. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam program keluarga berencana karena mencerminkan tingkat pemanfaatan metode kontrasepsi yang efektif dan dapat diandalkan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak.

Tingginya angka mCPR menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan aktif memanfaatkan layanan kontrasepsi modern, yang berdampak pada penurunan kehamilan yang tidak diinginkan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas

kesehatan ibu dan anak. Sebaliknya, angka mCPR yang rendah dapat menunjukkan adanya keterbatasan akses, kurangnya edukasi tentang kontrasepsi modern, atau preferensi masyarakat terhadap metode tradisional.

Peningkatan mCPR tidak hanya menandai keberhasilan program keluarga berencana, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan mCPR menjadi hal krusial bagi perencanaan, evaluasi, dan pengembangan strategi pelayanan kontrasepsi modern di tingkat wilayah maupun nasional.

Berdasarkan data terbaru, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*) di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pada tahun 2024, mCPR tercatat sebesar 77,5 persen, hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,7 persen. Pada tahun 2025, capaian mCPR mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencapai 82,54 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam mendorong pemanfaatan metode kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur di Kabupaten Temanggung.

Hasil ini juga mencerminkan efektivitas sosialisasi, penyuluhan, serta ketersediaan layanan kontrasepsi modern yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan mCPR berkontribusi langsung pada pengendalian jumlah kelahiran yang tidak diinginkan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Temanggung.

3) Persentase KB pasca persalinan

Persentase KB pasca persalinan merupakan indikator yang menunjukkan proporsi ibu yang baru melahirkan dan segera menggunakan metode kontrasepsi setelah persalinan.

Indikator ini penting untuk menilai keberhasilan program keluarga berencana dalam membantu ibu merencanakan jarak kelahiran anak berikutnya serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Penggunaan kontrasepsi pasca persalinan memiliki manfaat ganda, yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan memberikan jeda kehamilan yang cukup, serta mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan jumlah anak yang lebih optimal. Tingginya persentase KB pasca persalinan menunjukkan efektivitas program penyuluhan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan, termasuk di Puskesmas dan rumah sakit bersalin.

Sebaliknya, persentase yang rendah dapat menjadi indikator adanya keterbatasan akses, kurangnya informasi, atau hambatan budaya dan sosial dalam pemanfaatan layanan KB pasca persalinan. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat, meningkatkan partisipasi ibu pasca persalinan dalam program KB, serta mendukung tercapainya kesehatan reproduksi yang optimal bagi ibu dan keluarga.

Berdasarkan data yang tercatat di Kabupaten Temanggung, KB pasca persalinan pada tahun 2024 mencapai 52,42 persen, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 57,4 persen. Pada tahun 2025, capaian indikator ini berada pada angka 52,09 persen, menunjukkan adanya penurunan tipis dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Meski capaian belum mencapai target, data ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemanfaatan layanan KB pasca persalinan, baik melalui penyuluhan intensif, konseling lebih personal, maupun peningkatan akses layanan di fasilitas kesehatan. Peningkatan persentase KB pasca persalinan sangat penting untuk membantu ibu merencanakan jarak kelahiran berikutnya, menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta

mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Temanggung.

4) Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa banyak wilayah desa atau kelurahan telah berhasil mengembangkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri sesuai prinsip Program Keluarga Berkualitas. Program ini menekankan pembinaan keluarga melalui pendekatan holistik, mencakup kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, ekonomi keluarga, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang keluarga.

Tingginya persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam mengelola sumber daya keluarga secara mandiri, memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan baik, serta membangun lingkungan yang kondusif bagi keluarga. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan efektivitas pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tenaga penyuluh di tingkat desa atau kelurahan.

Sebaliknya, persentase yang rendah menjadi sinyal perlunya penguatan pembinaan keluarga, peningkatan kapasitas kader, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di tingkat wilayah. Pemantauan indikator ini menjadi penting untuk memastikan setiap keluarga dapat berkembang secara optimal, berdaya, dan mandiri, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan keluarga berkualitas di tingkat kabupaten maupun nasional.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2025 dari 289 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung terdapat 45 desa/kelurahan atau sekitar 15,57% yang telah berstatus Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, di mana hanya 43 desa/kelurahan atau 14,9% yang mencapai status mandiri.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembinaan keluarga berkualitas di tingkat desa/kelurahan melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat serta kader Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (PKK-KB). Desa atau kelurahan yang sudah mandiri menunjukkan kemampuan masyarakatnya dalam mengelola keluarga secara sehat, sejahtera, dan mandiri, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun lingkungan.

Meskipun terjadi peningkatan, persentase desa/kelurahan mandiri masih relatif rendah dibandingkan total wilayah di Kabupaten Temanggung, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk memperluas jangkauan program, memperkuat pembinaan, dan mendorong kolaborasi lintas sektor agar lebih banyak desa/kelurahan dapat mencapai status Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar program berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan dan kependudukan.

1) Tempat Pelayanan KB

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program Keluarga Berencana (KB) berperan penting dalam menekan angka kelahiran melalui pengaturan kehamilan, jarak kelahiran, dan jumlah anak. Salah satu pendekatan efektif dalam program KB adalah peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, MOW, dan MOP yang memiliki tingkat efektivitas tinggi, aman, serta efisien dari sisi biaya dan keberlanjutan.

Kabupaten Temanggung telah memiliki jejaring fasilitas pelayanan KB yang cukup luas, namun pemanfaatan MKJP masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan layanan, SDM, dan edukasi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, jumlah tempat pelayanan KB di Kabupaten Temanggung sebanyak 63 fasilitas yang telah teregistrasi oleh Kemenduk Bangsa/BKKBN, yang terdiri

dari: Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 1 unit, Rumah Sakit Swasta sebanyak 3 unit, Puskesmas sebanyak 26 unit, Praktik Dokter sebanyak 2 unit, Klinik Pratama sebanyak 3 unit dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) sebanyak 28 unit. Komposisi ini menunjukkan bahwa pelayanan KB di Kabupaten Temanggung didominasi oleh fasilitas pelayanan tingkat pertama, terutama Puskesmas dan Praktik Mandiri Bidan, yang menjadi ujung tombak pelayanan KB langsung ke masyarakat.

Sebaran fasilitas KB yang relatif merata hingga tingkat kecamatan dan desa memberikan peluang besar dalam meningkatkan cakupan peserta KB. PMB dan Puskesmas berperan strategis dalam menjangkau Pasangan Usia Subur (PUS), terutama di wilayah perdesaan. Secara umum, metode kontrasepsi non-MKJP (suntik dan pil) masih menjadi pilihan utama masyarakat karena: mudah diakses, minim prosedur medis dan persepsi lebih aman dan fleksibel. Sementara itu, MKJP masih menghadapi kendala berupa: ketakutan terhadap efek samping, mitos dan stigma di masyarakat serta kurangnya konseling KB yang komprehensif. Padahal, MKJP memiliki keunggulan utama dalam efektivitas pencegahan kehamilan dan kontribusi signifikan terhadap pengendalian penduduk.

Pelayanan KB MKJP memiliki dampak strategis terhadap penurunan Total Fertility Rate (TFR), pencegahan kehamilan tidak diinginkan, pengaturan jarak dan jumlah kelahiran serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Dengan durasi perlindungan yang panjang dan tingkat kegagalan rendah, MKJP berkontribusi langsung dalam menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Pelayanan kontrasepsi KB di Kabupaten Temanggung telah memiliki landasan fasilitas yang memadai. Namun, untuk mendukung pengendalian penduduk secara efektif dan berkelanjutan, perlu peningkatan signifikan pada pelayanan KB MKJP. Melalui penguatan SDM, fasilitas, edukasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor, MKJP dapat menjadi metode utama dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Temanggung.

2) Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Tempat Pelayanan KB

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu dan keberlanjutan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Sarana yang memadai mendukung pelayanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan berkualitas, khususnya untuk pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang membutuhkan alat khusus, ruang pelayanan yang layak, serta tenaga terlatih.

Kabupaten Temanggung memiliki 63 fasilitas pelayanan KB dengan variasi tingkat layanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis untuk menilai kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, kondisi sarana dan prasarana pelayanan KB di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Tempat Pelayanan KB

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Faskes	Persentase (%)
1	Tensimeter & Stetoskop	57	90,5
2	Timbangan	45	71,4
3	Kursi/Meja Ginekologi	50	79,4
4	Sterilator	53	84,1
5	IUD Kit	59	93,7
6	Implant Removal Kit	51	81,0
7	Vaksektomi Kit	3	4,8
8	Minilaparotomi Kit	3	4,8
9	Laparoskopi	1	1,6
10	Ruang Konseling KB & Kespro	56	88,9
11	Konseling Kit	48	76,2
12	Materi Kesehatan Reproduksi	39	61,9
13	Buku Panduan Praktis Pelayanan KB	38	60,3
14	Sarana Komputer/Laptop	35	55,6

Sebagian besar fasilitas pelayanan KB telah memiliki tensimeter dan stetoskop (90,5%) tersendiri sedangkan yang 9,5% lainnya masih pemakaian bersama untuk pelayanan lainnya, hal ini menunjukkan kesiapan dalam melakukan skrining awal sebelum pelayanan kontrasepsi. Demikian juga dengan timbangan baru tersedia di 71,4% yang dikhususkan

untuk pelayanan KB sedangkan yang 28,6% lainnya masih menjadi satu dengan pelayanan lainnya, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam pemantauan status kesehatan klien secara menyeluruh, terutama untuk pelayanan hormonal dan MKJP.

Ketersediaan kursi/meja ginekologi (79,4%) dan sterilator (84,1%) menunjukkan bahwa mayoritas fasilitas pelayanan KB mampu memberikan pelayanan KB dasar dan sebagian pelayanan MKJP perempuan (IUD dan implan) secara aman. Tingginya kepemilikan IUD Kit (93,7%) dan Implant Removal Kit (81,0%) mengindikasikan potensi besar untuk pengembangan pelayanan MKJP di tingkat pelayanan primer. Namun demikian, kesenjangan signifikan terlihat pada sarana pelayanan MKJP pria dan metode operatif, yaitu: Vaksektomi Kit hanya tersedia di 3 faskes (4,8%), Minilaparotomi Kit tersedia di 3 faskes (4,8%) dan Laparoskopi hanya tersedia di 1 faskes (1,6%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan KB operatif masih sangat terbatas dan terpusat di fasilitas rujukan tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap MKJP operatif, terutama MOP masih rendah.

Sarana konseling sebanyak 88,9% faskes telah memiliki ruang konseling KB dan kesehatan reproduksi, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan berbasis komunikasi dan edukasi. Namun, ketersediaan konseling kit (76,2%), materi kesehatan reproduksi (61,9%), dan buku panduan praktis pelayanan KB (60,3%) masih belum merata. Hal ini berpotensi berdampak pada kualitas konseling KB yang belum optimal, terutama dalam menyampaikan informasi berimbang mengenai MKJP serta mengatasi mitos dan kekhawatiran masyarakat.

Ketersediaan sarana komputer atau laptop baru mencapai 55,6% faskes, yang berpotensi menghambat pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, integrasi data dengan sistem informasi kesehatan dan monitoring dan evaluasi program KB secara tepat waktu.

Berdasarkan analisis sarana dan prasarana, pelayanan KB di Kabupaten Temanggung memiliki potensi

besar untuk dikembangkan, khususnya pada pelayanan MKJP non-operatif (IUD dan implan). Namun, keterbatasan sarana MKJP operatif dan sarana edukasi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengendalian penduduk.

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB di Kabupaten Temanggung sudah cukup memadai untuk pelayanan dasar dan MKJP non-operatif. Namun, masih diperlukan penguatan sarana strategis, terutama untuk pelayanan MKJP operatif, konseling berkualitas, dan sistem informasi. Dengan perbaikan tersebut, pelayanan KB di Kabupaten Temanggung dapat berkontribusi lebih optimal dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

3) Sumber Daya Tenaga Kesehatan Di Tempat Pelayanan KB

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Ketersediaan jumlah tenaga, jenis profesi, serta kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan sangat menentukan cakupan, mutu, dan keberlanjutan pelayanan KB, khususnya pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang membutuhkan keterampilan klinis dan konseling yang memadai.

Kabupaten Temanggung memiliki 63 tempat pelayanan KB dengan dukungan berbagai jenis tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis untuk menilai kecukupan dan kesiapan SDM dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Jumlah tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan KB di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: dokter spesialis kebidanan dan kandungan sebanyak 6 orang, dokter bedah/urologi sebanyak 2 orang, dokter umum sebanyak 59 orang, bidan sebanyak 436 orang, perawat sebanyak 9 orang dan tenaga administrasi sebanyak 3 orang. Komposisi tenaga kesehatan menunjukkan bahwa bidan merupakan tenaga dominan dalam pelayanan KB, terutama di fasilitas pelayanan tingkat pertama, sedangkan dokter spesialis dan dokter

bedah/urologi memiliki peran strategis pada pelayanan KB rujukan dan MKJP operatif.

Dalam menjaga mutu pelayanan tenaga kesehatan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang pernah diikuti oleh dokter kebidanan-kandungan dan urologi adalah pelatihan tubektomi sebanyak 5 orang, pelatihan vasektomi sebanyak 2 orang dan pelatihan konseling sebanyak 1 orang. Sebagian besar dokter spesialis telah memiliki keterampilan pelayanan MKJP operatif perempuan (tubektomi). Jumlah dokter yang memiliki kompetensi vasektomi masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya akses pelayanan KB pria.

Pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga dokter umum adalah pelatihan IUD/Implan sebanyak 3 orang, pelatihan kompetensi KB sebanyak 1 orang dan pelatihan konseling KB sebanyak 2 orang. Walaupun jumlah dokter umum relatif banyak (59 orang), hanya sebagian kecil yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan KB. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dokter umum dalam pelayanan KB, khususnya MKJP, belum optimal dan masih terbatas pada pelayanan dasar atau rujukan internal.

Pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga bidang adalah pelatihan IUD/Implan sebanyak 347 orang, pelatihan kompetensi sebanyak 108 orang, pelatihan konseling KB sebanyak 119 orang dan pelatihan rujukan dan R/R sebanyak 56 orang. Tingginya jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan IUD/Implan menunjukkan kesiapan yang sangat baik dalam pelayanan MKJP non-operatif. Namun, jumlah bidan yang memiliki pelatihan konseling dan kompetensi lanjutan masih belum mencakup seluruh bidan, sehingga kualitas konseling dan kesinambungan pelayanan belum merata. Pelatihan R/R yang masih terbatas dapat berdampak pada efektivitas sistem rujukan MKJP.

Pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga perawat hanya pelatihan rujukan dan R/R sebanyak 3 orang. Peran perawat dalam pelayanan KB masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas pelatihan. Potensi perawat

sebagai pendukung pelayanan KB (screening, edukasi, dan rujukan) belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tenaga kesehatan dan pelatihan, pelayanan KB di Kabupaten Temanggung memiliki beberapa implikasi teknis:

- a. Pelayanan MKJP non-operatif (IUD dan implan) relatif siap dan berpotensi dikembangkan lebih luas karena didukung oleh jumlah bidan terlatih yang besar.
- b. Pelayanan MKJP operatif (tubektomi dan vasektomi) masih sangat terbatas akibat minimnya tenaga dokter yang terlatih, khususnya untuk MOP.
- c. Kualitas konseling KB belum optimal dan belum merata di seluruh faskes, yang berpotensi memengaruhi tingkat penerimaan MKJP.
- d. Sistem rujukan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelatihan R/R.

Beberapa tantangan teknis yang dihadapi dalam pelayanan KB antara lain:

- a. Ketimpangan kompetensi antar tenaga kesehatan
- b. Terbatasnya tenaga terlatih MKJP operatif
- c. Rendahnya keterlibatan pria dalam pelayanan KB
- d. Belum optimalnya pelatihan konseling dan rujukan

Secara umum, Kabupaten Temanggung memiliki sumber daya tenaga kesehatan yang cukup untuk mendukung pelayanan KB, terutama pada pelayanan MKJP non-operatif. Namun, untuk mencapai pengendalian penduduk yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara merata, penguatan pelayanan MKJP operatif, serta peningkatan kualitas konseling dan sistem rujukan.

4) Capaian Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan data dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat sebanyak 121.698 pasangan, dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebanyak 102.095 pasangan. Sampai dengan tahun 2025, PUS yang telah mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) mencapai 100.451 akseptor, baik

pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non MKJP. Capaian tersebut setara dengan 82,5% dari total PUS dan 98,4% berdasarkan PPM, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang membutuhkan layanan KB telah terlayani.

Dari total 100.451 akseptor aktif tersebut, sebanyak 48.902 akseptor atau 48,68% merupakan pengguna MKJP, dengan rincian terdiri dari MOW sebanyak 6.158 akseptor, MOP sebanyak 137 akseptor, implan sebanyak 28.407 akseptor, dan IUD sebanyak 14.200 akseptor. Sementara itu, akseptor Non MKJP berjumlah 51.549 atau 51,32%, yang terdiri dari pengguna kondom sebanyak 9.047 akseptor, suntik sebanyak 38.012 akseptor, dan pil sebanyak 4.490 akseptor. Metode suntik masih menjadi pilihan terbanyak di kelompok Non MKJP.

Berdasarkan capaian peserta KB aktif per kecamatan, tiga kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Kecamatan Tretep sebesar 86,3%, Kecamatan Jumo sebesar 85,6%, dan Kecamatan Wonobojo sebesar 85,6%. Sebaliknya, tiga kecamatan dengan capaian terendah adalah Kecamatan Parakan sebesar 76,6%, Kecamatan Temanggung sebesar 77,2%, dan Kecamatan Kledung sebesar 81,3%. Data ini menunjukkan adanya variasi capaian antar wilayah yang memerlukan perhatian dalam upaya pemerataan pelayanan.

Dilihat dari penggunaan MKJP, tiga kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Kecamatan Kranggan sebesar 63,7%, Kecamatan Pringsurat sebesar 63,5%, dan Kecamatan Kaloran sebesar 56,0%. Sementara itu, tiga kecamatan dengan capaian MKJP terendah adalah Kecamatan Tretep sebesar 30,5%, Kecamatan Wonobojo sebesar 41,0%, dan Kecamatan Ngadirejo sebesar 41,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya capaian peserta KB aktif tidak selalu diikuti dengan tingginya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.

Adapun jumlah PUS yang belum menjadi peserta KB (unmet need) tercatat sebanyak 21.247 pasangan atau 17,46%. Rinciannya terdiri dari 2.482 pasangan yang sedang

hamil, 9.716 pasangan yang ingin memiliki anak segera, 4.831 pasangan yang ingin menunda kehamilan serta 4.218 pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Kelompok yang ingin menunda dan tidak ingin anak lagi menjadi sasaran penting dalam peningkatan pelayanan dan konseling KB, khususnya dalam promosi penggunaan MKJP. Secara keseluruhan, capaian Program KB di Kabupaten Temanggung tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan pemerataan layanan di beberapa kecamatan serta penguatan strategi untuk menurunkan angka unmetneed.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini dirancang untuk mendorong keluarga agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keluarga yang sehat, produktif, dan harmonis.

Fokus utama program ini adalah pemberdayaan keluarga melalui edukasi dan pembinaan di berbagai bidang, antara lain kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, keterampilan ekonomi keluarga, serta pembentukan perilaku dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang keluarga. Dengan pemberdayaan ini, keluarga diharapkan dapat menjadi unit sosial yang mandiri, berdaya, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, program ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat, baik melalui kelompok kerja masyarakat, kader keluarga berencana, maupun lembaga desa/kelurahan, untuk ikut mendukung tercapainya keluarga sejahtera. Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini juga meningkatkan efektivitas intervensi, memperkuat jejaring sosial, dan memastikan bahwa kebutuhan keluarga di tingkat lokal

dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tidak hanya bertujuan pada peningkatan kualitas keluarga secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sehat, berdaya, dan sejahtera di Kabupaten Temanggung.

Untuk mengukur keberhasilan program ini Pemerintah kabupaten Temanggung menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu:

1) Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita

Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi orang tua dan keluarga dalam program pembinaan keluarga dengan anak balita. Kegiatan BKB dirancang untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan, stimulasi, serta pendidikan dini yang tepat bagi balita, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tingginya persentase partisipasi keluarga dalam BKB mencerminkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam memastikan kesehatan, gizi, pendidikan, dan perkembangan psikososial anak balita. Selain itu, keikutsertaan keluarga juga menandakan efektivitas penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh kader atau tenaga penyuluh di tingkat desa/kelurahan.

Sebaliknya, persentase yang rendah menjadi indikasi perlunya peningkatan sosialisasi, motivasi, dan aksesibilitas program, sehingga lebih banyak keluarga dapat terlibat aktif dalam kegiatan BKB. Dengan meningkatnya partisipasi keluarga dalam BKB, diharapkan tercapai generasi balita yang sehat, cerdas, dan siap berkembang, sekaligus mendukung tercapainya keluarga yang sejahtera dan berkualitas di tingkat masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2025 di Kabupaten Temanggung terdapat 12.721 keluarga dari total 25.325 keluarga atau sekitar 50,23 persen yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Angka ini tidak hanya

melebihi target yang ditetapkan sebesar 45,56 persen, tetapi juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 45,53 persen pada tahun 2024.

Peningkatan partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB ini mencerminkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak balita secara optimal, baik dari aspek kesehatan, gizi, stimulasi, maupun pendidikan dini. Keikutsertaan yang lebih tinggi juga menandakan efektivitas pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh dan kader di tingkat desa/kelurahan.

Capaian ini menjadi indikator positif dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Temanggung, karena partisipasi aktif keluarga dalam BKB berkontribusi langsung pada tercapainya generasi balita yang sehat, cerdas, dan siap berkembang, sekaligus mendukung pencapaian keluarga sejahtera dan berkualitas.

2) Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keluarga mampu membimbing, mendidik, dan mendukung perkembangan remaja secara optimal. Indeks ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, moral, psikososial, dan kesiapan remaja menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perencanaan masa depan.

Tingginya indeks pengasuhan menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Temanggung mampu memberikan perhatian, bimbingan, dan lingkungan yang kondusif bagi remaja untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Hal ini juga mencerminkan efektivitas program pembinaan keluarga, pendampingan remaja, serta peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kapasitas remaja.

Sebaliknya, indeks yang rendah menandakan perlunya intervensi lebih lanjut, baik melalui penyuluhan, edukasi,

maupun peningkatan kapasitas orang tua dalam mengasuh remaja. Pemantauan dan peningkatan indeks pengasuhan keluarga bagi remaja menjadi penting untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berdaya, dan siap menghadapi tantangan kehidupan, serta mendukung tercapainya keluarga sejahtera di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan data yang tersedia, indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 86,8%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 87,3%. Angka ini juga mengalami penurunan tipis dibandingkan capaian tahun 2024, yang mencapai 87,23%.

Meskipun terdapat penurunan yang relatif kecil, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Temanggung telah mampu memberikan bimbingan, pengasuhan, dan dukungan yang baik bagi remaja, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, moral, dan pengembangan kapasitas diri.

Penurunan tipis ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan peran serta orang tua dan keluarga dalam mendampingi remaja, melalui edukasi, pendampingan, serta program-program penguatan keluarga. Dengan upaya tersebut, diharapkan indeks pengasuhan keluarga bagi remaja dapat kembali meningkat dan mendekati atau bahkan melampaui target, sehingga remaja di Kabupaten Temanggung dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

3) Indeks lansia berdaya

Indeks Lansia Berdaya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan lansia dalam menjalani kehidupan secara mandiri, produktif, dan bermartabat. Indeks ini mencakup aspek kesehatan, kemandirian ekonomi, partisipasi sosial, serta keterlibatan lansia dalam kegiatan masyarakat dan keluarga.

Tingginya indeks lansia berdaya menunjukkan bahwa lansia memiliki kualitas hidup yang baik, mampu menjaga

kesehatan fisik dan mental, tetap aktif secara sosial, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan program pembinaan lansia, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Sebaliknya, indeks yang rendah menjadi indikasi perlunya intervensi lebih lanjut, seperti peningkatan pelayanan kesehatan lansia, penguatan kapasitas ekonomi, serta pengembangan kegiatan sosial yang melibatkan lansia. Pemantauan dan peningkatan indeks lansia berdaya menjadi penting untuk memastikan lansia dapat menjalani masa lanjut usia dengan sehat, mandiri, dan tetap produktif, sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Lansia Berdaya di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 75,9 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 57,9 persen. Angka ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2024, yaitu sebesar 57,83 persen.

Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembinaan lansia, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta dukungan sosial dan ekonomi yang diberikan kepada lansia di Kabupaten Temanggung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia di wilayah ini semakin mampu menjalani kehidupan secara mandiri, tetap produktif, serta aktif berperan dalam keluarga dan masyarakat.

Capaian yang tinggi ini menjadi indikator positif bahwa kebijakan dan program pemberdayaan lansia di Kabupaten Temanggung efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, sekaligus mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

BAB V

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. Inovasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2021–2025 telah mengembangkan berbagai inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut difokuskan pada penguatan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan ketahanan keluarga, serta optimalisasi pengendalian penduduk berbasis data. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, DPPPAPPKB menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti sistem pelaporan kasus berbasis digital, edukasi daring, serta integrasi data lintas sektor. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat efektivitas program yang dijalankan. Dengan adanya inovasi-inovasi ini, diharapkan tercipta masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera, berkeadilan gender, serta memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Adapun inovasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Inovasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIMANTAP KON KB	PKB, Kader IMP	-	Pencatatan dan pelaporan penyuluhan dan pelayanan KB	Pencatatan dan pelaporan	Masyarakat dan PUS	DPPPAPPKB TAHUN 2021
2	SIPESAN PERAK	DPPPAPPKB, masyarakat	APBD	Sisten Pelaporan	DPPPAPPB, Masyarakat	Terlapornya kasus kekerasan	DPPPAPPKB TAHUN 2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				kasus oleh masyarakat		terhadap masyarakat dan anak	
3	AKSI PENTING	PKB dan Satgas Stunting	-	Pemantauan intervensi penurunan Stunting	DPPPAPPKB, Satgas dan Masyarakat	Terpantauannya, pelaporannya, pemberian PMT dan TTD selama 90 HARI BERTURUT	DPPPAPPKB TAHUN 2022
4	Optimalisasi pertanggung jawaban keuangan dengan pembuatan E-Book saku dan form cek list	ASN	-	Pembuatan dan form cek list SPJ	Pemakaian buku saku	SPJ	Tahun 2022
5	Anter Ceting Kamu	ASN	-	Penyuluhan terpadu pencegahan stunting dan nikah muda	Masyarakat dan remaja	Terlaksananya penyuluhan dalam rangka pencegahan stunting dan meurunkannya nikah muda	Tahun 2022

B. Penghargaan





Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung pada periode 2021–2025 telah menorehkan berbagai prestasi dan penghargaan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja dinas dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta keberhasilan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga.

Tidak hanya secara kelembagaan, capaian prestasi juga diraih oleh individu aparatur serta organisasi dan lembaga yang berada di bawah pembinaan DPPPAPPKB. Berbagai penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan dinas dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Prestasi yang diraih antara lain dalam bidang Kabupaten/Kota Layak Anak, pengelolaan program Bangga Kencana, inovasi pelayanan publik, hingga penghargaan bagi kader, kelompok masyarakat, dan mitra kerja yang berprestasi.


Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, guna mewujudkan masyarakat yang berdaya, terlindungi, dan sejahtera secara berkelanjutan. Bentuk penghargaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 di Bawah ini.

Tabel 8
Daftar Penghargaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Tanda Penghargaan
1	2021	Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) dengan kategori UTAMA	
2	2021	Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan peringkat MADYA	
3	2022	Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan peringkat MADYA	

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Tanda Penghargaan
4	2022	Juara 1 kegiatan pelayanan KB dalam rangka TMKK, (TNI Manunggal KB Kesehatan) Bangga kecana, dalam rangka hari Ulah TNI ke 77 wilayah Kodam IV Diponegoro Propinsi Jawa Tengah.	
5	2022	Penghargaan Puskesmas Temanggung, sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) Terstandarisasi dan Menjadi Rujukan Nasional tahun 2022	
6	2023	Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tahun 2023, dengan kategori Madya;	
7	2023	Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan peringkat Madya tahun 2023	
8	2024	Penghargaan Penyuluh KB Teladan I Tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 2024, atas Nama Aritha Dewi Wadyastuti Penyuluh KB Kecamatan Kranggan.	

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Tanda Penghargaan
9	2024	Penghargaan Sebagai Tim Penggerak PKK Terbaik II Penilaian Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.	
10	2024	Penghargaan Gerakan Serentak Penertiban Nomor Induk Berusaha Untuk Kelompok UPPKA	
11	2024	Penghargaan Institusi Masyarakat Pedesaan Teladan III, Tingkat Provinsi Jawa Tengah, atas nama Windarti, PPKBD Desa Pingit Kecamatan Pringsurat	
12	2024	Penghargaan Capaian KBPP MKJP Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pascapersalinan Dalam Rangka Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2024, atas nama PMB Siti Aisah Zahrotun	
13	2024	Penghargaan Pelaksana Terbaik I Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Penggerakan Dan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana Nahdlatul Ulama Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Tanda Penghargaan
14	2025	Penghargaan Apresiasi Pengelolaan DAK Sub Bidang KB bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	

BAB VI PENUTUP

Dokumen Profil DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Temanggung. Dokumen ini tidak hanya merekam berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, tetapi juga memotret secara objektif berbagai tantangan dan permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian bersama.

Penyusunan profil ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan ke depan. Data yang tersaji di dalamnya diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dalam menentukan prioritas program, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, berbasis bukti (*evidence-based*), serta berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, dokumen ini juga menjadi cerminan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, baik antar perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, maupun komunitas lokal. Upaya mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak yang optimal, pengendalian penduduk yang seimbang, serta pembangunan keluarga berkualitas tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan

seimbang memerlukan inovasi, komitmen, serta kerja nyata yang konsisten. Melalui dokumen profil ini, diharapkan berbagai isu strategis tersebut dapat teridentifikasi dengan lebih jelas sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif dan solutif.

Akhirnya, besar harapan bahwa Dokumen Profil DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat umum sebagai referensi dalam memahami kondisi dan perkembangan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Semoga dokumen ini menjadi salah satu pijakan penting dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung yang lebih maju, inklusif, berkeadilan gender, ramah anak, serta memiliki keluarga-keluarga yang tangguh, sejahtera, dan berkualitas di masa yang akan datang.

Temanggung, Januari 2026
Kepala Dinas PPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Dra. Gema Aris Wahyudi, MM
NIP. 197007301990012002

LAMPPIRAN

DATA JUMLAH PENDUDUK				
DI KABUPATEN TEMANGGUNG BERDASARKAN JENIS KELAMIN				
TAHUN 2025				
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BULU	25.838	25.066	50.904
2	TEMBARAK	16.637	15.951	32.588
3	TEMANGGUNG	42.410	42.877	85.287
4	PRINGSURAT	27.113	27.026	54.139
5	KALORAN	23.809	23.708	47.517
6	KANDANGAN	27.959	27.119	55.078
7	KEDU	31.157	30.532	61.689
8	PARAKAN	27.613	27.229	54.842
9	NGADIREJO	29.949	29.236	59.185
10	JUMO	15.819	15.635	31.454
11	TRETEP	11.349	10.858	22.207
12	CANDIROTO	17.190	17.011	34.201
13	KRANGGAN	25.604	25.819	51.423
14	TLOGOMULYO	12.150	11.675	23.825
15	SELOPAMPANG	10.745	10.456	21.201
16	BANSARI	12.796	12.352	25.148
17	KLEDUNG	14.792	14.282	29.074
18	BEJEN	11.238	10.975	22.213
19	WONOBOYO	14.007	13.622	27.629
20	GEMAWANG	17.869	17.568	35.437
	JUMLAH	416.044	408.997	825.041

**DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	00-04			05-09			10-14			15-19			20-24			25-29		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	BULU	1.373	1.389	2.762	1.838	1.777	3.615	2.077	1.906	3.983	2.048	1.886	3.934	1.825	1.781	3.606	1.972	1.815	3.787
2	TEMBARAK	938	889	1.827	1.313	1.177	2.490	1.312	1.292	2.604	1.395	1.294	2.689	1.241	1.223	2.464	1.209	1.150	2.359
3	TEMANGGUNG	2.072	2.029	4.101	2.945	2.774	5.719	3.424	3.225	6.649	3.595	3.513	7.108	3.475	3.176	6.651	3.277	3.145	6.422
4	PRINGSURAT	1.419	1.297	2.716	1.886	1.836	3.722	2.023	1.982	4.005	2.151	1.987	4.138	1.920	2.024	3.944	2.033	1.920	3.953
5	KALORAN	1.087	1.132	2.219	1.618	1.501	3.119	1.767	1.697	3.464	1.751	1.623	3.374	1.733	1.669	3.402	1.680	1.702	3.382
6	KANDANGAN	1.585	1.364	2.949	1.973	1.945	3.918	2.336	2.071	4.407	2.374	2.167	4.541	2.150	1.971	4.121	1.923	1.910	3.833
7	KEDU	1.722	1.596	3.318	2.251	2.158	4.409	2.401	2.351	4.752	2.465	2.285	4.750	2.350	2.200	4.550	2.294	2.198	4.492
8	PARAKAN	1.406	1.278	2.684	2.010	1.873	3.883	2.194	2.107	4.301	2.222	2.105	4.327	2.206	2.098	4.304	2.108	1.965	4.073
9	NGADIREJO	1.629	1.523	3.152	2.224	2.079	4.303	2.460	2.244	4.704	2.373	2.228	4.601	2.177	2.206	4.383	2.173	2.125	4.298
10	JUMO	825	781	1.606	1.128	1.027	2.155	1.097	1.097	2.194	1.225	1.128	2.353	1.059	1.134	2.193	1.159	1.120	2.279
11	TRETEP	642	613	1.255	820	809	1.629	889	837	1.726	861	756	1.617	817	763	1.580	819	850	1.669
12	CANDIROTO	941	845	1.786	1.240	1.178	2.418	1.314	1.173	2.487	1.235	1.230	2.465	1.250	1.199	2.449	1.251	1.213	2.464
13	KRANGGAN	1.301	1.245	2.546	1.915	1.709	3.624	2.002	1.955	3.957	2.079	1.937	4.016	1.856	1.787	3.643	1.870	1.803	3.673
14	TLOGOMULYO	626	628	1.254	913	758	1.671	989	866	1.855	1.002	914	1.916	890	871	1.761	863	855	1.718
15	SELOPAMPANG	658	528	1.186	756	711	1.467	887	841	1.728	842	835	1.677	785	734	1.519	806	760	1.566
16	BANSARI	659	590	1.249	919	804	1.723	975	997	1.972	960	917	1.877	901	825	1.726	882	842	1.724
17	KLEDUNG	753	675	1.428	1.117	1.012	2.129	1.194	1.140	2.334	1.140	1.098	2.238	991	918	1.909	920	952	1.872
18	BEJEN	598	553	1.151	761	693	1.454	831	736	1.567	870	806	1.676	785	822	1.607	845	847	1.692
19	WONOBOYO	747	762	1.509	993	904	1.897	1.046	1.000	2.046	1.007	1.009	2.016	1.018	1.068	2.086	1.114	981	2.095
20	GEMAWANG	936	907	1.843	1.258	1.153	2.411	1.348	1.288	2.636	1.431	1.416	2.847	1.270	1.297	2.567	1.300	1.228	2.528
	JUMLAH	21.917	20.624	42.541	29.878	27.878	57.756	32.566	30.805	63.371	33.026	31.134	64.160	30.699	29.766	60.465	30.498	29.381	59.879

DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	BULU	1.796	1.765	3.561	1894	1662	3556	1.690	1.670	3.360	1.771	1.871	3.642	1.876	1.854	3.730	1.763	1.674	3.437
2	TEMBARAK	1.229	1.143	2.372	1228	1111	2339	1.101	1.055	2.156	1.141	1.132	2.273	1.082	1.005	2.087	1.021	1.048	2.069
3	TEMANGGUNG	2.985	2.924	5.909	2892	2861	5753	3.027	3.022	6.049	2.859	2.970	5.829	2.631	2.862	5.493	2.741	3.045	5.786
4	PRINGSURAT	1.953	1.914	3.867	1827	1873	3700	1.828	1.859	3.687	1.930	1.962	3.892	1.902	1.926	3.828	1.929	2.075	4.004
5	KALORAN	1.770	1.718	3.488	1656	1578	3234	1.658	1.612	3.270	1.698	1.771	3.469	1.674	1.688	3.362	1.654	1.750	3.404
6	KANDANGAN	1.953	1.900	3.853	2029	1834	3863	1.950	1.948	3.898	2.008	1.883	3.891	1.716	1.778	3.494	1.698	1.797	3.495
7	KEDU	2.375	2.209	4.584	2144	2035	4179	2.112	2.057	4.169	2.141	2.131	4.272	2.005	2.131	4.136	1.967	2.081	4.048
8	PARAKAN	2.011	1.851	3.862	1862	1718	3580	1.981	1.977	3.958	2.029	2.044	4.073	1.859	1.915	3.774	1.748	1.913	3.661
9	NGADIREJO	2.133	2.012	4.145	2052	1861	3913	2.134	2.087	4.221	2.130	2.084	4.214	1.960	1.863	3.823	1.914	2.002	3.916
10	JUMO	1.104	1.143	2.247	1085	1047	2132	1.046	969	2.015	1.034	1.035	2.069	1.132	1.083	2.215	1.127	1.176	2.303
11	TRETEP	777	783	1.560	813	674	1487	823	806	1.629	874	885	1.759	795	696	1.491	679	701	1.380
12	CANDIROTO	1.241	1.178	2.419	1123	1093	2216	1.159	1.065	2.224	1.177	1.195	2.372	1.208	1.199	2.407	1.156	1.278	2.434
13	KRANGGAN	1.767	1.818	3.585	1828	1848	3676	1.900	1.846	3.746	1.762	1.841	3.603	1.710	1.838	3.548	1.717	1.853	3.570
14	TLOGOMULYO	826	879	1.705	882	868	1750	874	809	1.683	852	832	1.684	832	772	1.604	742	781	1.523
15	SELOPAMPANG	776	795	1.571	806	701	1507	702	686	1.388	737	757	1.494	748	680	1.428	628	669	1.297
16	BANSARI	852	815	1.667	861	771	1632	933	921	1.854	974	936	1.910	833	801	1.634	823	842	1.665
17	KLEDUNG	913	1.038	1.951	1048	981	2029	1.213	1.116	2.329	1.272	1.189	2.461	1.027	918	1.945	867	825	1.692
18	BEJEN	840	805	1.645	792	737	1529	717	696	1.413	792	791	1.583	778	785	1.563	743	765	1.508
19	WONOBOYO	974	933	1.907	885	836	1721	937	882	1.819	970	984	1.954	995	964	1.959	931	938	1.869
20	GEMAWANG	1.207	1.184	2.391	1255	1225	2480	1.184	1.251	2.435	1.429	1.333	2.762	1.299	1.263	2.562	1.153	1.146	2.299
	JUMLAH	29.482	28.807	58.289	28.962	27.314	56.276	28.969	28.334	57.303	29.580	29.626	59.206	28.062	28.021	56.083	27.001	28.359	55.360

**DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	60-64			65-69			70-74			75+			TOTAL		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	BULU	1.380	1.367	2.747	1.093	1.145	2.238	803	708	1.511	639	796	1.435	25.838	25.066	50.904
2	TEMBARAK	757	850	1.607	747	671	1.418	471	422	893	452	489	941	16.637	15.951	32.588
3	TEMANGGUNG	2.353	2.682	5.035	1.964	2.034	3.998	1.246	1.305	2.551	924	1.310	2.234	42.410	42.877	85.287
4	PRINGSURAT	1.628	1.590	3.218	1.224	1.225	2.449	734	699	1.433	726	857	1.583	27.113	27.026	54.139
5	KALORAN	1.382	1.495	2.877	1.153	1.113	2.266	747	734	1.481	781	925	1.706	23.809	23.708	47.517
6	KANDANGAN	1.447	1.606	3.053	1.208	1.290	2.498	838	737	1.575	771	918	1.689	27.959	27.119	55.078
7	KEDU	1.658	1.741	3.399	1.419	1.397	2.816	942	888	1.830	911	1.074	1.985	31.157	30.532	61.689
8	PARAKAN	1.476	1.572	3.048	1.112	1.234	2.346	790	763	1.553	599	816	1.415	27.613	27.229	54.842
9	NGADIREJO	1.679	1.716	3.395	1.248	1.395	2.643	939	860	1.799	724	951	1.675	29.949	29.236	59.185
10	JUMO	946	966	1.912	773	816	1.589	540	534	1.074	539	579	1.118	15.819	15.635	31.454
11	TRETEP	590	553	1.143	474	526	1.000	349	307	656	327	299	626	11.349	10.858	22.207
12	CANDIROTO	1.056	1.079	2.135	758	870	1.628	558	574	1.132	523	642	1.165	17.190	17.011	34.201
13	KRANGGAN	1.394	1.483	2.877	1.109	1.255	2.364	738	702	1.440	656	899	1.555	25.604	25.819	51.423
14	TLOGOMULYO	629	677	1.306	552	537	1.089	370	313	683	308	315	623	12.150	11.675	23.825
15	SELOPAMPANG	531	555	1.086	459	498	957	322	344	666	302	362	664	10.745	10.456	21.201
16	BANSARI	739	789	1.528	656	626	1.282	430	381	811	399	495	894	12.796	12.352	25.148
17	KLEDUNG	700	761	1.461	645	696	1.341	475	416	891	517	547	1.064	14.792	14.282	29.074
18	BEJEN	659	706	1.365	527	526	1.053	372	327	699	328	380	708	11.238	10.975	22.213
19	WONOBOYO	778	764	1.542	634	694	1.328	473	428	901	505	475	980	14.007	13.622	27.629
20	GEMAWANG	908	853	1.761	758	818	1.576	561	530	1.091	572	676	1.248	17.869	17.568	35.437
	JUMLAH	22.690	23.805	46.495	18.513	19.366	37.879	12.698	11.972	24.670	11.503	13.805	25.308	416.044	408.997	825.041

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	TIDAK/BLM SEKOLAH			BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT			TAMAT SD/SEDERAJAT			SLTP/SEDERAJAT			SLTA/SEDERAJAT			DIPLOMA I/II		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	BULU	7.045	6.651	13.696	7.204	7.162	14.366	5.196	4.482	9.678	3.015	3.220	6.235	2.623	2.516	5.139	41	92	133
2	TEMBARAK	5.685	5.513	11.198	2.627	2.599	5.226	3.536	3.137	6.673	2.491	2.407	4.898	1.860	1.652	3.512	40	71	111
3	TEMANGGUNG	10.189	10.221	20.410	5.448	5.310	10.758	7.030	7.576	14.606	5.696	5.435	11.131	9.551	8.884	18.435	242	390	632
4	PRINGSURAT	8.773	9.091	17.864	2.060	1.893	3.953	5.930	5.933	11.863	5.603	5.369	10.972	4.037	3.674	7.711	48	118	166
5	KALORAN	9.292	9.533	18.825	2.622	2.419	5.041	5.027	5.028	10.055	3.653	3.578	7.231	2.579	2.324	4.903	86	100	186
6	KANDANGAN	12.297	12.058	24.355	3.486	3.020	6.506	5.106	4.886	9.992	3.577	3.596	7.173	2.766	2.606	5.372	91	117	208
7	KEDU	9.324	8.718	18.042	6.923	6.668	13.591	6.239	5.911	12.150	3.740	4.028	7.768	3.801	3.550	7.351	105	172	277
8	PARAKAN	8.625	8.466	17.091	4.463	4.348	8.811	4.736	4.287	9.023	3.597	3.694	7.291	4.678	4.425	9.103	106	167	273
9	NGADIREJO	6.853	6.617	13.470	4.866	4.745	9.611	8.109	7.552	15.661	5.453	5.459	10.912	3.662	3.523	7.185	97	148	245
10	JUMO	5.295	5.229	10.524	2.766	2.639	5.405	3.585	3.252	6.837	2.090	2.351	4.441	1.611	1.480	3.091	54	91	145
11	TRETEP	3.930	3.795	7.725	2.399	2.182	4.581	3.006	2.880	5.886	1.462	1.455	2.917	431	409	840	16	25	41
12	CANDIROTO	3.934	3.616	7.550	4.469	4.485	8.954	4.142	4.005	8.147	2.163	2.368	4.531	1.872	1.686	3.558	73	119	192
13	KRANGGAN	7.818	8.151	15.969	3.552	3.869	7.421	4.234	4.329	8.563	4.931	4.561	9.492	4.096	3.653	7.749	85	114	199
14	TLOGOMULYO	3.588	3.433	7.021	2.289	2.217	4.506	3.139	2.644	5.783	1.772	1.981	3.753	1.140	1.065	2.205	13	36	49
15	SELOPAMPANG	2.923	2.758	5.681	1.670	1.744	3.414	2.780	2.741	5.521	1.668	1.624	3.292	1.406	1.165	2.571	37	36	73
16	BANSARI	2.076	1.891	3.967	4.324	4.413	8.737	2.868	2.314	5.182	1.998	2.127	4.125	1.223	1.187	2.410	24	39	63
17	KLEDUNG	5.785	5.608	11.393	2.153	1.966	4.119	3.713	3.266	6.979	1.946	2.158	4.104	1.031	1.025	2.056	10	26	36
18	BEJEN	3.416	3.317	6.733	1.257	1.163	2.420	2.994	3.057	6.051	2.028	1.953	3.981	1.288	1.140	2.428	38	40	78
19	WONOBOYO	4.325	4.280	8.605	1.752	1.836	3.588	4.273	3.920	8.193	2.380	2.339	4.719	1.051	902	1.953	37	43	80
20	GEMAWANG	6.677	6.390	13.067	3.575	3.632	7.207	4.019	3.798	7.817	2.112	2.214	4.326	1.199	1.167	2.366	44	42	86
	JUMLAH	127.850	125.336	253.186	69.905	68.310	138.215	89.662	84.998	174.660	61.375	61.917	123.292	51.905	48.033	99.938	1.287	1.986	3.273

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	AKADEMI/DIPL.III/ S.MUDA			DIPLOMA IV/STRATA I			STRATA-II			STRATA-III			TOTAL		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	BULU	173	260	433	514	651	1.165	27	31	58	-	1	1	25.838	25.066	50.904
2	TEMBARAK	72	99	171	311	454	765	12	17	29	3	2	5	16.637	15.951	32.588
3	TEMANGGUNG	878	1.225	2.103	3.101	3.622	6.723	263	211	474	12	3	15	42.410	42.877	85.287
4	PRINGSURAT	135	188	323	499	732	1.231	27	27	54	1	1	2	27.113	27.026	54.139
5	KALORAN	97	153	250	433	561	994	19	12	31	1	-	1	23.809	23.708	47.517
6	KANDANGAN	125	199	324	476	621	1.097	31	14	45	4	2	6	27.959	27.119	55.078
7	KEDU	220	362	582	752	1.087	1.839	52	36	88	1	-	1	31.157	30.532	61.689
8	PARAKAN	334	451	785	996	1.332	2.328	70	57	127	8	2	10	27.613	27.229	54.842
9	NGADIREJO	231	306	537	655	872	1.527	22	14	36	1	-	1	29.949	29.236	59.185
10	JUMO	97	149	246	306	431	737	13	13	26	2	-	2	15.819	15.635	31.454
11	TRETEP	23	26	49	76	84	160	5	2	7	1	-	1	11.349	10.858	22.207
12	CANDIROTO	143	202	345	379	522	901	13	8	21	2	-	2	17.190	17.011	34.201
13	KRANGGAN	174	250	424	672	862	1.534	40	29	69	2	1	3	25.604	25.819	51.423
14	TLOGOMULYO	51	76	127	150	218	368	7	3	10	1	2	3	12.150	11.675	23.825
15	SELOPAMPANG	45	86	131	208	298	506	7	3	10	1	1	2	10.745	10.456	21.201
16	BANSARI	53	100	153	220	275	495	10	6	16	-	-	-	12.796	12.352	25.148
17	KLEDUNG	36	65	101	110	164	274	8	3	11	-	1	1	14.792	14.282	29.074
18	BEJEN	47	88	135	157	209	366	12	8	20	1	-	1	11.238	10.975	22.213
19	WONOBOYO	52	62	114	132	232	364	5	7	12	-	1	1	14.007	13.622	27.629
20	GEMAWANG	55	80	135	183	237	420	4	8	12	1	-	1	17.869	17.568	35.437
	JUMLAH	3.041	4.427	7.468	10.330	13.464	23.794	647	509	1.156	42	17	59	416.044	408.997	825.041

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPALA KELUARGA DAN STATUS PERKAWINAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA			STATUS PERKAWINAN											
					BELUM KAWIN			KAWIN			CERAI HIDUP			CERAI MATI		
		L	P	Σ	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BULU	14.479	2.732	17.211	11.334	8.831	20.165	13.466	13.646	27.112	457	544	1.001	581	2.045	2.626
2	TEMBARAK	8.792	1.638	10.430	7.804	6.122	13.926	8.207	8.328	16.535	269	264	533	357	1.237	1.594
3	TEMANGGUNG	22.661	6.102	28.763	20.150	17.041	37.191	20.156	20.407	40.563	952	1.347	2.299	1.152	4.082	5.234
4	PRINGSURAT	15.566	2.998	18.564	11.423	9.405	20.828	14.385	14.598	28.983	583	692	1.275	722	2.331	3.053
5	KALORAN	13.930	2.495	16.425	9.717	7.881	17.598	13.091	13.393	26.484	448	518	966	553	1.916	2.469
6	KANDANGAN	15.380	2.904	18.284	12.607	9.725	22.332	14.243	14.675	28.918	488	614	1.102	621	2.105	2.726
7	KEDU	17.373	3.432	20.805	13.790	10.906	24.696	16.174	16.510	32.684	520	710	1.230	673	2.406	3.079
8	PARAKAN	14.674	3.748	18.422	13.151	10.430	23.581	13.242	13.469	26.711	612	806	1.418	608	2.524	3.132
9	NGADIREJO	16.558	3.354	19.912	13.447	10.662	24.109	15.282	15.526	30.808	549	667	1.216	671	2.381	3.052
10	JUMO	9.229	1.726	10.955	6.535	5.228	11.763	8.675	8.858	17.533	261	334	595	348	1.215	1.563
11	TRETEP	6.598	868	7.466	4.657	3.539	8.196	6.352	6.496	12.848	132	149	281	208	674	882
12	CANDIROTO	9.799	1.933	11.732	7.327	5.782	13.109	9.150	9.275	18.425	328	442	770	385	1.512	1.897
13	KRANGGAN	14.531	3.105	17.636	11.032	9.091	20.123	13.529	13.979	27.508	463	613	1.076	580	2.136	2.716
14	TLOGOMULYO	6.865	1.144	8.009	5.274	4.034	9.308	6.375	6.493	12.868	240	286	526	261	862	1.123
15	SELOPAMPANG	5.820	1.109	6.929	4.907	3.806	8.713	5.432	5.606	11.038	154	207	361	252	837	1.089
16	BANSARI	7.208	1.332	8.540	5.578	4.235	9.813	6.706	6.825	13.531	250	275	525	262	1.017	1.279
17	KLEDUNG	8.336	1.471	9.807	6.394	4.899	11.293	7.768	7.869	15.637	274	309	583	356	1.205	1.561
18	BEJEN	6.536	1.211	7.747	4.682	3.659	8.341	6.012	6.146	12.158	239	290	529	305	880	1.185
19	WONOBOYO	7.951	1.159	9.110	5.792	4.544	10.336	7.709	7.903	15.612	223	270	493	283	905	1.188
20	GEMAWANG	10.368	1.694	12.062	7.457	5.976	13.433	9.708	9.933	19.641	330	380	710	374	1.279	1.653
	JUMLAH	232.654	46.155	278.809	183.058	145.796	328.854	215.662	219.935	435.597	7.772	9.717	17.489	9.552	33.549	43.101

JUMLAH PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA TUA										
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025										
NO	KECAMATAN	USIA MUDA			USIA PRODUKTIF			USIA TUA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BULU	5.288	5.072	10.360	18.015	17.345	35.360	2.535	2.649	5.184
2	TEMBARAK	3.563	3.358	6.921	11.404	11.011	22.415	1.670	1.582	3.252
3	TEMANGGUNG	8.441	8.028	16.469	29.835	30.200	60.035	4.134	4.649	8.783
4	PRINGSURAT	5.328	5.115	10.443	19.101	19.130	38.231	2.684	2.781	5.465
5	KALORAN	4.472	4.330	8.802	16.656	16.606	33.262	2.681	2.772	5.453
6	KANDANGAN	5.894	5.380	11.274	19.248	18.794	38.042	2.817	2.945	5.762
7	KEDU	6.374	6.105	12.479	21.511	21.068	42.579	3.272	3.359	6.631
8	PARAKAN	5.610	5.258	10.868	19.502	19.158	38.660	2.501	2.813	5.314
9	NGADIREJO	6.313	5.846	12.159	20.725	20.184	40.909	2.911	3.206	6.117
10	JUMO	3.050	2.905	5.955	10.917	10.801	21.718	1.852	1.929	3.781
11	TRETEP	2.351	2.259	4.610	7.848	7.467	15.315	1.150	1.132	2.282
12	CANDIROTO	3.495	3.196	6.691	11.856	11.729	23.585	1.839	2.086	3.925
13	KRANGGAN	5.218	4.909	10.127	17.883	18.054	35.937	2.503	2.856	5.359
14	TLOGOMULYO	2.528	2.252	4.780	8.392	8.258	16.650	1.230	1.165	2.395
15	SELOPAMPANG	2.301	2.080	4.381	7.361	7.172	14.533	1.083	1.204	2.287
16	BANSARI	2.553	2.391	4.944	8.758	8.459	17.217	1.485	1.502	2.987
17	KLEDUNG	3.064	2.827	5.891	10.091	9.796	19.887	1.637	1.659	3.296
18	BEJEN	2.190	1.982	4.172	7.821	7.760	15.581	1.227	1.233	2.460
19	WONOBOYO	2.786	2.666	5.452	9.609	9.359	18.968	1.612	1.597	3.209
20	GEMAWANG	3.542	3.348	6.890	12.436	12.196	24.632	1.891	2.024	3.915
	JUMLAH	84.361	79.307	163.668	288.969	284.547	573.516	42.714	45.143	87.857

JUMLAH PENYULUH KB DAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/PERKOTAAN (IMP)					
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025					
NO	KECAMATAN	PKB	KADER IMP		
			PPKBD	SUB PPKBD	JUMLAH
1	BULU	2	19	94	113
2	TEMBARAK	2	13	76	89
3	TEMANGGUNG	2	25	143	168
4	PRINGSURAT	2	14	121	135
5	KALORAN	2	14	117	131
6	KANDANGAN	2	16	112	128
7	KEDU	2	14	116	130
8	PARAKAN	2	16	87	103
9	NGADIREJO	2	20	107	127
10	JUMO	2	13	60	73
11	TRETEP	1	11	31	42
12	CANDIROTO	2	14	82	96
13	KRANGGAN	2	13	128	141
14	TLOGOMULYO	2	12	53	65
15	SELOPAMPANG	1	12	47	59
16	BANSARI	1	13	47	60
17	KLEDUNG	2	13	39	52
18	BEJEN	1	14	57	71
19	WONOBOYO	1	13	58	71
20	GEMAWANG	2	10	62	72
	JUMLAH	35	289	1.637	1.926

**JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB BERDASARKAN JENIS
TAHUN: 2025**

Prov : JAWA TENGAH

Kab : TEMANGGUNG

KODE	KECAMATAN	JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB	JENIS TEMPAT PELAYANAN KB													
			JUMLAH FASKES	JENIS FASKES						PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES)	JUMLAH JARINGAN/ JEJARING	JENIS JARINGAN / JEJARING				
				RS UMUM	RS KHUSUS	KLINIK UTAMA	PUSKES MAS	PRAKTIK DOKTER	KLINIK PRATAMA			RS TIPE D PRATAMA	PUSTU	PUSLING	POSKESDES/ POLINDES	PRAKTIK MANDIRI BIDAN JEJARING
1	2	3=4+12+13	4=Σ(5-11)	5	6	7	8	9	10	11	12	13=Σ(14-17)	14	15	16	17
01	BULU	3	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
02	TEMBARAK	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
03	TEMANGGUNG	9	8	2	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0
04	PRINGSURAT	4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
05	KALORAN	4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
06	KANDANGAN	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
07	KEDU	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
08	PARAKAN	6	3	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
09	NGADIREJO	4	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10	JUMO	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	TRETEP	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	CANDIROTO	3	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
13	KRANGGAN	5	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
14	TLOGOMULYO	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	SELOPAMPANG	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	BANSARI	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	KLEDUNG	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	BEJEN	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19	WONOBOYO	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	GEMAWANG	3	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah Total		63	35	4	0	0	26	2	3	0	28	0	0	0	0	0

DATA KAMPUNG KB MENURUT KLASIFIKASI										
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025										
No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Dasar		Berkembang		Mandiri		Berkelanjutan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BULU	19	16	84,21	0	0,00	2	10,53	1	5,26
2	TEMBARAK	13	10	76,92	0	0,00	0	0,00	3	23,08
3	TEMANGGUNG	25	23	92,00	0	0,00	1	4,00	1	4,00
4	PRINGSURAT	14	12	85,71	0	0,00	1	7,14	1	7,14
5	KALORAN	14	12	85,71	0	0,00	0	0,00	2	14,29
6	KANDANGAN	16	15	93,75	0	0,00	0	0,00	1	6,25
7	KEDU	14	11	78,57	0	0,00	2	14,29	1	7,14
8	PARAKAN	16	15	93,75	0	0,00	1	6,25	0	0,00
9	NGADIREJO	20	20	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	JUMO	13	3	23,08	2	15,38	3	23,08	5	38,46
11	TRETEP	11	8	72,73	1	9,09	0	0,00	2	18,18
12	CANDIROTO	14	11	78,57	1	7,14	1	7,14	1	7,14
13	KRANGGAN	13	8	61,54	0	0,00	1	7,69	4	30,77
14	TLOGOMULYO	12	9	75,00	0	0,00	0	0,00	3	25,00
15	SELOPAMPANG	12	9	75,00	0	0,00	1	8,33	2	16,67
16	BANSARI	13	9	69,23	4	30,77	0	0,00	0	0,00
17	KLEDUNG	13	13	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	BEJEN	14	11	78,57	0	0,00	1	7,14	2	14,29
19	WONOBOYO	13	10	76,92	0	0,00	0	0,00	3	23,08
20	GEMAWANG	10	8	80,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00
Jumlah		289	233	80,62	8	2,77	16	5,54	32	11,07

DATA KAMPUNG KB BERDASARKAN POKJA TERLATIH								
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025								
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ada		Tidak Ada		Belum Isi	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BULU	19	2	10,53	2	10,53	15	78,95
2	TEMBARAK	13	5	38,46	1	7,69	7	53,85
3	TEMANGGUNG	25	4	16,00	6	24,00	15	60,00
4	PRINGSURAT	14	2	14,29	1	7,14	11	78,57
5	KALORAN	14	2	14,29	2	14,29	10	71,43
6	KANDANGAN	16	1	6,25	2	12,50	13	81,25
7	KEDU	14	2	14,29	2	14,29	10	71,43
8	PARAKAN	16	2	12,50	14	87,50	0	0,00
9	NGADIREJO	20	0	0,00	17	85,00	3	15,00
10	JUMO	13	11	84,62	1	7,69	1	7,69
11	TRETEP	11	3	27,27	0	0,00	8	72,73
12	CANDIROTO	14	3	21,43	1	7,14	10	71,43
13	KRANGGAN	13	5	38,46	0	0,00	8	61,54
14	TLOGOMULYO	12	2	16,67	1	8,33	9	75,00
15	SELOPAMPANG	12	2	16,67	1	8,33	9	75,00
16	BANSARI	13	5	38,46	2	15,38	6	46,15
17	KLEDUNG	13	1	7,69	3	23,08	9	69,23
18	BEJEN	14	3	21,43	2	14,29	9	64,29
19	WONOBOYO	13	3	23,08	0	0,00	10	76,92
20	GEMAWANG	10	3	30,00	1	10,00	6	60,00
Total		289	61	21,11	59	20,42	169	58,48

JUMLAH KAMPUNG KB BERDASARKAN KEPEMILIKAN RUMAH DATAKU								
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025								
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ada		Tidak Ada		Belum Isi	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BULU	19	3	15,79	1	5,26	15	78,95
2	TEMBARAK	13	5	38,46	1	7,69	7	53,85
3	TEMANGGUNG	25	6	24,00	4	16,00	15	60,00
4	PRINGSURAT	14	3	21,43	0	0,00	11	78,57
5	KALORAN	14	2	14,29	2	14,29	10	71,43
6	KANDANGAN	16	2	12,50	1	6,25	13	81,25
7	KEDU	14	3	21,43	1	7,14	10	71,43
8	PARAKAN	16	9	56,25	7	43,75	0	0,00
9	NGADIREJO	20	0	0,00	17	85,00	3	15,00
10	JUMO	13	10	76,92	2	15,38	1	7,69
11	TRETEP	11	3	27,27	0	0,00	8	72,73
12	CANDIROTO	14	3	21,43	1	7,14	10	71,43
13	KRANGGAN	13	2	15,38	3	23,08	8	61,54
14	TLOGOMULYO	12	1	8,33	2	16,67	9	75,00
15	SELOPAMPANG	12	1	8,33	2	16,67	9	75,00
16	BANSARI	13	3	23,08	4	30,77	6	46,15
17	KLEDUNG	13	1	7,69	3	23,08	9	69,23
18	BEJEN	14	3	21,43	2	14,29	9	64,29
19	WONOBOYO	13	2	15,38	1	7,69	10	76,92
20	GEMAWANG	10	2	20,00	2	20,00	6	60,00
Total		289	64	22,15	56	19,38	169	58,48

JUMLAH KAMPUNG KB BERDASARKAN KEPEMILIKAN POKTAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	BKB		BKR		BKL		UPPKA		PIK-R		Poktan		Memiliki 1-2 Jenis Poktan	Memiliki 4-4 Jenis Poktan	Memiliki 5 Jenis Poktan	Total
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%				
1	BULU	19	4	21,05	4	21,05	4	21,05	4	21,05	4	21,05	20	105,26	0	0	4	4
2	TEMBARAK	13	6	46,15	4	30,77	5	38,46	5	38,46	4	30,77	24	184,62	2	0	4	6
3	TEMANGGUNG	25	10	40,00	6	24,00	6	24,00	8	32,00	7	28,00	37	148,00	3	2	5	10
4	PRINGSURAT	14	3	21,43	3	21,43	3	21,43	1	7,14	2	14,29	12	85,71	0	2	1	3
5	KALORAN	14	4	28,57	3	21,43	3	21,43	2	14,29	3	21,43	15	107,14	1	1	2	4
6	KANDANGAN	16	3	18,75	3	18,75	3	18,75	2	12,50	3	18,75	14	87,50	0	1	2	3
7	KEDU	14	4	28,57	4	28,57	4	28,57	3	21,43	4	28,57	19	135,71	0	1	3	4
8	PARAKAN	16	16	100,00	6	37,50	10	62,50	3	18,75	10	62,50	45	281,25	9	4	3	16
9	NGADIREJO	20	17	85,00	6	30,00	10	50,00	6	30,00	6	30,00	45	225,00	8	8	1	17
10	JUMO	13	12	92,31	8	61,54	12	92,31	10	76,92	10	76,92	52	400,00	1	3	8	12
11	TRETEP	11	3	27,27	3	27,27	3	27,27	3	27,27	2	18,18	14	127,27	0	1	2	3
12	CANDIROTO	14	4	28,57	4	28,57	4	28,57	3	21,43	3	21,43	18	128,57	0	1	3	4
13	KRANGGAN	13	5	38,46	4	30,77	4	30,77	4	30,77	5	38,46	22	169,23	1	0	4	5
14	TLOGOMULYO	12	3	25,00	3	25,00	3	25,00	1	8,33	3	25,00	13	108,33	0	2	1	3
15	SELOPAMPANG	12	3	25,00	1	8,33	3	25,00	1	8,33	2	16,67	10	83,33	1	1	1	3
16	BANSARI	13	7	53,85	4	30,77	7	53,85	6	46,15	4	30,77	28	215,38	0	4	3	7
17	KLEDUNG	13	4	30,77	3	23,08	4	30,77	3	23,08	3	23,08	17	130,77	1	0	3	4
18	BEJEN	14	5	35,71	3	21,43	4	28,57	3	21,43	2	14,29	17	121,43	2	1	2	5
19	WONOBOYO	13	3	23,08	3	23,08	3	23,08	1	7,69	3	23,08	13	100,00	0	2	1	3
20	GEMAWANG	10	4	40,00	1	10,00	2	20,00	3	30,00	3	30,00	13	130,00	1	3	0	4
Total		289	120	100,00	76	63,33	97	80,83	72	60,00	83	69,17	448	155,02	30	37	53	120

**JUMLAH KAMPUNG KB BERDASARKAN PENGGUNAAN DATA DALAM PERENCANAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

No	Kecamatan	PK dan Pemutahiran Data		Data Rutin BKKBN		Potensi Desa		Data Sektoral		Lainnya		Tidak Menggunakan Data		Belum Isi		Menggunakan Jenis Data			Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	1 Data	2 Data	>2 Data	
1	BULU	1	5,26	0	0,00	1	5,26	1	5,26	0	0,00	0	0,00	18	94,74			1	19
2	TEMBARAK	2	15,38	2	15,38	2	15,38	2	15,38	1	7,69	0	0,00	11	84,62			2	13
3	TEMANGGUNG	1	4,00	0	0,00	1	4,00	0	0,00	0	0,00	3	12,00	20	80,00	2			25
4	PRINGSURAT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00				14
5	KALORAN	3	21,43	2	14,29	1	7,14	2	14,29	2	14,29	1	7,14	10	71,43		1	2	14
6	KANDANGAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,25	15	93,75				16
7	KEDU	2	14,29	2	14,29	2	14,29	0	0,00	0	0,00	2	14,29	10	71,43			2	14
8	PARAKAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,25	15	93,75				16
9	NGADIREJO	1	5,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	95,00			1	20
10	JUMO	6	46,15	4	30,77	7	53,85	3	23,08	5	38,46	0	0,00	3	23,08	4	2	4	13
11	TRETEP	3	27,27	3	27,27	3	27,27	3	27,27	0	0,00	0	0,00	8	72,73			3	11
12	CANDIROTO	3	21,43	2	14,29	2	14,29	2	14,29	1	7,14	0	0,00	11	78,57	1		2	14
13	KRANGGAN	4	30,77	2	15,38	4	30,77	3	23,08	1	7,69	0	0,00	9	69,23		1	3	13
14	TLOGOMULYO	3	25,00	2	16,67	3	25,00	2	16,67	1	8,33	0	0,00	9	75,00		1	2	12
15	SELOPAMPANG	2	16,67	1	8,33	1	8,33	2	16,67	0	0,00	1	8,33	9	75,00			2	12
16	BANSARI	4	30,77	2	15,38	4	30,77	0	0,00	0	0,00	2	15,38	7	53,85		2	2	13
17	KLEDUNG	1	7,69	1	7,69	2	15,38	1	7,69	0	0,00	0	0,00	11	84,62	1		1	13
18	BEJEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00				14
19	WONOBOYO	3	23,08	3	23,08	3	23,08	1	7,69	1	7,69	0	0,00	10	76,92			3	13
20	GEMAWANG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00				10
Total		39	13,49	27	9,34	37	12,80	22	7,61	12	4,15	11	3,81	233	80,62	8	7	30	289

**PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER KB
KELESTARIAN PA DA PUS BUKAN PESERTA KB
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	KONTRASEPSI								PUS	PPM PA 2025	% PPM	% PUS	PUS BUKAN PESERTA KB					PUS BUKAN PESERTA KB				
		IUD	MW	MP	KD	IMP	SNT	PIL	JUMLAH					Hamil	TIDAK HAMIL			Hamil	TIDAK HAMIL				
															Ingin Anak	Ingin Anak	Tidak Ingin		JUMLAH	Ingin Anak	Ingin Anak	Tidak Ingin	JUMLAH
1	B U L U	1.073	402	6	383	1.455	3.125	173	6.617	7.776	6.662	99,32	85,10	149	565	291	154	1.159	149	896	114	347	1.159
2	TEMBARAK	272	184	0	306	1.174	1.686	270	3.892	4.698	3.847	101,17	82,84	100	353	179	174	806	100	564	142	199	806
3	TEMANGGUNG	1.170	622	10	1.815	1.866	1.799	322	7.604	9.847	8.009	94,94	77,22	244	1.082	464	453	2.243	244	1.677	322	348	2.243
4	PRINGSURAT	1.088	373	9	700	2.663	1.366	306	6.505	7.940	6.955	93,53	81,93	147	753	352	183	1.435	147	1.166	122	335	1.435
5	KALORAN	514	271	5	314	2.372	1.886	281	5.643	6.749	5.681	99,33	83,61	102	547	198	259	1.106	102	911	93	436	1.106
6	KANDANGAN	1.090	393	5	640	2.209	2.177	480	6.994	8.343	7.118	98,26	83,83	172	712	269	196	1.349	172	912	265	271	1.349
7	K E D U	942	302	5	605	2.194	3.282	176	7.506	9.120	7.433	100,98	82,30	261	631	422	300	1.614	261	1.075	278	255	1.614
8	PARAKAN	869	429	12	534	1.345	2.105	134	5.428	7.087	5.529	98,17	76,59	156	664	407	432	1.659	156	1.358	145	372	1.659
9	NGADIREJO	901	492	6	684	1.597	3.327	234	7.241	8.848	7.345	98,58	81,84	156	653	450	348	1.607	156	1.209	242	393	1.607
10	J U M O	526	230	4	327	1.317	1.399	157	3.960	4.624	4.021	98,48	85,64	100	273	127	164	664	100	486	78	286	664
11	TRETEP	287	152	33	100	555	2.054	189	3.370	3.905	3.484	96,73	86,30	67	179	125	164	535	67	330	138	295	535
12	CANDIROTO	828	304	6	449	724	1.739	206	4.256	5.040	4.416	96,38	84,44	53	365	148	218	784	53	634	97	105	784
13	KRANGGAN	1.086	373	9	698	2.670	1.363	302	6.501	7.803	6.575	98,87	83,31	134	683	308	177	1.302	134	1.037	131	223	1.302
14	TLOGOMULYO	531	166	2	243	723	1.615	105	3.385	4.004	3.375	100,30	84,54	60	288	127	144	619	60	474	85	153	619
15	SELOPAMPANG	359	136	6	149	993	896	186	2.725	3.277	2.775	98,20	83,16	87	268	132	65	552	87	403	62	125	552
16	BANSARI	682	252	0	255	555	1.495	116	3.355	4.018	3.293	101,88	83,50	97	310	171	85	663	97	506	60	177	663
17	KLEDUNG	523	320	3	138	849	1.998	115	3.946	4.852	3.973	99,32	81,33	95	440	195	176	906	95	629	182	145	906
18	B E J E N	522	221	4	132	542	1.103	199	2.723	3.275	2.753	98,91	83,15	72	216	147	117	552	72	375	105	148	552
19	WONOBOYO	494	123	2	125	859	1.826	178	3.607	4.213	3.632	99,31	85,62	74	271	95	166	606	74	428	104	202	606
20	GEMAWANG	443	413	10	450	1.745	1.771	361	5.193	6.279	5.219	99,50	82,70	156	463	224	243	1.086	156	810	120	372	1.086
	JUMLAH	14.200	6.158	137	9.047	28.407	38.012	4.490	100.451	121.698	102.095	98,39	82,54	2.482	9.716	4.831	4.218	21.247	2.233	14.420	2.629	4.641	19.282

UNMETNEED						
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025						
						Lampiran : 12
NO	KECAMATAN	INGIN ANAK DITUNDA (IAT)	TIDAK INGIN ANAK LAGI (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	%
1	2	3	4	5=klm 3+4	6	7= klm 5/6
1	B U L U	291	154	445	7.776	5,72
2	TEMBARAK	179	174	353	4.698	7,51
3	TEMANGGUNG	464	453	917	9.847	9,31
4	PRINGSURAT	352	183	535	7.940	6,74
5	KALORAN	198	259	457	6.749	6,77
6	KANDANGAN	269	196	465	8.343	5,57
7	K E D U	422	300	722	9.120	7,92
8	PARAKAN	407	432	839	7.087	11,84
9	NGADIREJO	450	348	798	8.848	9,02
10	J U M O	127	164	291	4.624	6,29
11	TRETEP	125	164	289	3.905	7,40
12	CANDIROTO	148	218	366	5.040	7,26
13	KRANGGAN	308	177	485	7.803	6,22
14	TLOGOMULYO	127	144	271	4.004	6,77
15	SELOPAMPANG	132	65	197	3.277	6,01
16	BANSARI	171	85	256	4.018	6,37
17	KLEDUNG	195	176	371	4.852	7,65
18	B E J E N	147	117	264	3.275	8,06
19	WONOBOYO	95	166	261	4.213	6,20
20	GEMAWANG	224	243	467	6.279	7,44
	JUMLAH	4.831	4.218	9.049	121.698	7,44

PESERTA KB AKTIF DAN KB BARU MKJP DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025								
NO	KECAMATAN	PESERTA KB AKTIF			PESERTA KB BARU			
		TOTAL PA	CAPAIAN PA MKJP	%	PPM PB	PPM PB MKJP	CAPAIAN PB MKJP	%
1	B U L U	6.617	2.936	44,37	416	292	246	84,25
2	TEMBARAK	3.892	1.630	41,88	345	242	303	125,21
3	TEMANGGUNG	7.604	3.668	48,24	755	529	334	63,14
4	PRINGSURAT	6.505	4.133	63,54	570	399	270	67,67
5	KALORAN	5.643	3.162	56,03	478	335	328	97,91
6	KANDANGAN	6.994	3.697	52,86	459	322	398	123,60
7	K E D U	7.506	3.443	45,87	715	500	469	93,80
8	PARAKAN	5.428	2.655	48,91	719	503	283	56,26
9	NGADIREJO	7.241	2.996	41,38	650	456	332	72,81
10	J U M O	3.960	2.077	52,45	259	182	147	80,77
11	TRETEP	3.370	1.027	30,47	319	224	158	70,54
12	CANDIROTO	4.256	1.862	43,75	339	237	173	73,00
13	KRANGGAN	6.501	4.138	63,65	463	325	298	91,69
14	TLOGOMULYO	3.385	1.422	42,01	244	171	90	52,63
15	SELOPAMPANG	2.725	1.494	54,83	207	146	117	80,14
16	BANSARI	3.355	1.489	44,38	233	163	179	109,82
17	KLEDUNG	3.946	1.695	42,95	311	218	272	124,77
18	B E J E N	2.723	1.289	47,34	223	156	179	114,74
19	WONOBOYO	3.607	1.478	40,98	329	231	156	67,53
20	GEMAWANG	5.193	2.611	50,28	415	292	188	64,38
	JUMLAH	100.451	48.902	48,68	8.449	5.923	4.920	83,07

**PB DOMISILI PER KECAMATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	IUD	MP	MW	IP	SNT	PILL	KDM	JML PB	PPM PB	% THD PPM	RANKING
1.	KRANGGAN	113	0	21	105	70	0	6	326	463	70,41	1
2.	KLEDUNG	71	0	11	221	58	0	0	361	311	116,08	2
3.	JUMO	131	1	53	149	64	5	12	415	259	160,23	3
4.	BEJEN	77	0	24	169	116	25	66	477	223	213,90	4
5.	TEMBARAK	61	0	14	253	37	9	2	376	345	108,99	5
6.	KANDANGAN	115	0	22	261	76	0	4	478	459	104,14	6
7.	BANSARI	172	0	33	264	106	6	31	612	233	262,66	7
8.	KEDU	119	0	27	137	152	8	14	457	715	63,92	8
9.	PRINGSURAT	129	1	36	166	70	30	48	480	570	84,21	9
10.	SELOPAMPANG	42	0	5	100	92	14	19	272	207	131,40	10
11.	KALORAN	50	0	11	97	39	6	5	208	478	43,51	11
12.	BULU	89	0	8	76	40	3	14	230	416	55,29	12
13.	WONOBOYO	86	0	22	190	168	2	46	514	329	156,23	13
14.	NGADIREJO	35	0	7	48	20	1	4	115	650	17,69	14
15.	GEMAWANG	33	0	7	77	19	11	18	165	415	39,76	15
16.	CANDIROTO	93	0	12	74	31	2	2	214	339	63,13	16
17.	TRETEP	76	0	13	183	55	0	4	331	319	103,76	17
18.	PARAKAN	90	1	5	83	50	1	4	234	719	32,55	18
19.	TEMANGGUNG	64	0	11	81	62	19	9	246	755	32,58	19
20.	TLOGOMULYO	43	0	20	125	74	15	9	286	244	117,21	20
KAB/DOMISILI		1.689	3	362	2.859	1.399	157	317	6.797	8.449	80,45	
LUAR KAB		156	0	46	76	20	4	3	305		3,61	
TOTAL PB		1845	3	408	2935	1419	161	320	7.102	8.449	84,06	

**JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MELAPOR BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KEKERASAN PER KECAMATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%	UMUR KORBAN KEKERASAN YANG MELAPOR (Tahun)																JENIS KEKERASAN									
				19-20		21-25		26-30		31-35		36-40		41-45		46-50		>50		FISIK		SEKSUAL		PSIKIS		PENELANTARAN		EKSPLOITASI	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	BULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TEMBARAK	1	16,67	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0
3	TEMANGGUNG	1	16,67	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0
4	PRINGSURAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KALORAN	1	16,67	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0
6	KANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PARAKAN	1	16,67	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	1	16,67	0	0	0	0
9	NGADIREJO	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0
10	JUMO	1	16,67	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TRETEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CANDIROTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KRANGGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TLOGOMULYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SELOPAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BANSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KLEDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BEJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	WONOBOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	GEMAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		6	100	0	0	2	33,33	3	50	0	0	0	0	0	0	1	16,67	0	0	1	16,67	3	50	2	33,33	1	16,67	0	0

**JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN JENIS KEKERASAN PER KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%	JENIS KELAMIN				UMUR ANAK KORBAN KEKERASAN (Tahun)								JENIS KEKERASAN									
				LAKI-LAKI		PEREMPUAN		0-5		6-10		11-15		16-18		FISIK		SEKSUAL		PSIKIS		PERUNDUNGAN		EKSPLOITASI	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	BULU	5	25,0	2	40,0	3	60,0	0	0,0	1	20,0	1	20,0	3	60,0	0	0,0	3	60,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0
2	TEMBARAK	2	10,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2	100,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0
3	TEMANGGUNG	3	15,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	PRINGSURAT	2	10,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
5	KALORAN	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6	KANDANGAN	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7	KEDU	3	15,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0
8	PARAKAN	1	5,0	0	0,0	2	200,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
9	NGADIREJO	1	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0
10	JUMO	1	5,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11	TRETEP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12	CANDIROTO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	KRANGGAN	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14	TLOGOMULYO	2	10,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
15	SELOPAMPANG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16	BANSARI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17	KLEDUNG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18	BEJEN	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	WONOBOYO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	GEMAWANG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
JUMLAH		20	100	4	20,0	16	80,0	0	0,0	3	15,0	8	40,0	9	45,0	1	5,0	13	65,0	4	20,0	3	15,0	1	5,0